



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Nawa Cita yang telah tertuang dalam Visi, Misi dan Rencana Aksi pembangunan nasional, sasaran pembangunan pertanian adalah mewujudkan kedaulatan pangan, di mana seluruh kebutuhan pangan pokok akan diupayakan secara optimal untuk dicukupi dari produksi dalam negeri. Amanah sasaran pembangunan pertanian tersebut ditindaklanjuti Kementerian Pertanian melalui penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.

Strategi pembangunan pertanian selama periode 2015-2019 dititikberatkan pada 7 (tujuh) Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), yaitu (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) Penguatan kelembagaan petani; (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy; (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian. Selain tujuh strategi utama, terdapat 9 strategi pendukung, yaitu: (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM Pertanian; (2) Peningkatan dukungan perkarantina; (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi; (4) Pelayanan informasi publik; (5) Pengelolaan regulasi; (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; (7) Pengelolaan perencanaan; (8) Penataan dan penguatan organisasi; dan (9) Pengelolaan sistem pengawasan.

Tantangan dan sekaligus isu strategis yang dihadapi pembangunan pertanian sampai saat ini antara lain : keterbatasan

luas baku lahan untuk setiap komoditas, terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih unggul, perubahan iklim, bencana alam, serangan hama dan penyakit, masih kurangnya populasi ternak, masih terbatasnya kapasitas kelembagaan petani, makin berkurangnya tenaga kerja pertanian, terbatasnya modal petani, kondisi perekonomian global yang melemah, gejolak harga pangan global, peningkatan jumlah penduduk, distribusi pangan yang belum bisa merata, serta panjangnya rantai tata niaga komoditas pertanian.

Kementerian Pertanian di tahun 2019, telah menetapkan arah pelaksanaan program dan kegiatan, maupun target yang ingin dicapai yaitu: (1) Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula; (2) Terjaminnya distribusi pangan; (3) Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi; dan (4) Meningkatnya konsumsi pangan lokal; (5) Stabilitasnya produksi cabai dan bawang merah; (6) Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing; (7) Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi; (8) Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani; (9) Meningkatnya pendapatan keluarga petani; (10) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kementerian Pertanian; dan (11) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian. Selanjutnya, untuk menghadapi isu strategis dan permasalahan yang dihadapi, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya kegiatan prioritas, meliputi : (1) optimalisasi pemanfaatan lahan tadah hujan (rainfed field), pasang surut, dan rawa lebak sebagai upaya peningkatan indeks pertanaman (IP) 1 menjadi 2-3 didukung pengembangan infrastruktur sumber-sumber air, (2) pengembangan pertanian di wilayah perbatasan berorientasi ekspor, (3) pengembangan pertanian organik, (4) percepatan peningkatan populasi ternak sapi melalui upaya khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB), (5) hilirisasi produk pertanian, dan (6) stabilisasi harga dan penguatan pasar.

Sejalan dengan hal tersebut, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang yang merupakan salah satu UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian terus berupaya mendukung program kerja yang sudah ditargetkan oleh Kementerian Pertanian.

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang mempunyai peran yang strategis dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian baik pada jajaran petugas (aparatur) yang memberikan pelayanan publik sebagai aparat, maupun pada masyarakat tani (non aparatur), sesuai dengan tugas yang diembannya, yaitu melaksanakan pelatihan dan mengembangkan teknik diklat teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Pelaksanaan kegiatan BBPP Lembang tahun 2019 didasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPP Lembang tahun anggaran 2019 telah ditetapkan dalam surat pengesahan DIPA nomor: SP SP DIPA-018.10.2.239701/2018 tanggal 7 Desember 2018. telah terjadi revisi DIPA sebanyak 8 kali sampai dengan nomor: SP DIPA-018.10.2.239701/2019 dan revisi POK sebanyak 21 kali di bulan Desember 2019 yang disebabkan adanya kebijakan dan perubahan kegiatan strategis mendukung program Kementerian Pertanian pada tahun berjalan.

Pelaksanaan dan output kegiatan yang telah dilaksanakan BBPP Lembang selama tahun 2019 dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BBPP Lembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2019. LAKIN berfungsi sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi dilingkungan BBPP Lembang, sekaligus sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja teknis, organisasi dan administrasi BBPP Lembang menjadi instansi publik yang prima.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, termasuk BBPP Lembang.

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 101/Permentan/OT.140/10/2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, maka BBPP Lembang mempunyai tugas **“melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian”**.

2. Fungsi

BBPP Lembang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang hortikultura bagi aparatur dan non-aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang hortikultura bagi aparatur dan non-aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;

- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang hortikultura;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non-aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non-aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator agribisnis;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Lembang.

C. Organisasi dan Tata Kerja BBPP Lembang

1. Organisasi dan Tata Kerja

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BBPP Lembang secara organisasi didukung oleh: Eselon III, sebanyak 3 (tiga) orang dan Eselon IV sebanyak 7 (tujuh) orang. Susunan organisasi Eselon III dan IV Balai Besar Diklat Pertanian (BBPP) Lembang secara umum sebagai berikut:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Penyelenggara Diklat;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas masing-masing Bagian/Bidang pada BBPP Lembang adalah sebagai berikut:

1) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, instalasi dan saran teknis.

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, instalasi dan saran teknis.

Bagian Umum terdiri atas:

- 1) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga;
- 2) Kepala Subbagian Keuangan;
- 3) Kepala Subbagian Perlengkapan dan Instalasi.

Adapun tugasnya yaitu:

- 1) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- 2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- 3) Subbagian Perlengkapan dan Instalasi mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan instalasi dan saran teknis.

2).Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaksanaan kerjasama dan identifikasi kebutuhan pelatihan dibidang

pertanian, pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan dibidang pertanian;
- e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- 1) Seksi Program dan Kerjasama;
- 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Tugasnya yaitu:

1. Seksi Program dan Kerjasama, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama dan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur di bidang pertanian, serta pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya
2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pelaporan.

3).Bidang Penyelenggaraan Pelatihan

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan

fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur pertanian serta pengelolaan unit inkubator usaha tani.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur di bidang pertanian;
- b. Pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis dan profesi bagi aparatur dan non aparatur di bidang hortikultura;
- c. Pemberian pelayanan penyelenggaraan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis bagi aparatur dan non aparatur;
- d. Pengelolaan unit Inkubator Usaha Tani (IUT).

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan terdiri atas:

- 1) Kepala Seksi Pelatihan Aparatur
- 2) Kepala Seksi Pelatihan Non Aparatur

Adapun tugasnya yaitu:

- 1) Seksi pelatihan aparatur, mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional, teknis profesi, serta pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang hortikultura bagi aparatur.
- 2) Seksi pelatihan non aparatur, mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis profesi, serta pengembangan model dan teknik pelatihan teknis bagi nonaparatur dibidang hortikultura, serta pengelolaan unit inkubator usaha tani.

4).Jabatan Fungsional Tertentu (Widyaiswara)

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Widyaiswara, serta sejumlah jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di Bidang pertanian;
- b. Melakukan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- c. Melakukan pelatihan teknis dibidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- d. Melakukan pelatihan profesi dibidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur;
- e. Melakukan uji kompetensi dibidang pertanian
- f. Melakukan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pelatihan;
- g. Melakukan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang hortikultura;
- h. Melakukan pemberian konsultasi dibidang pertanian;
- i. Melakukan bimbingan lanjutan pelatihan dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- j. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

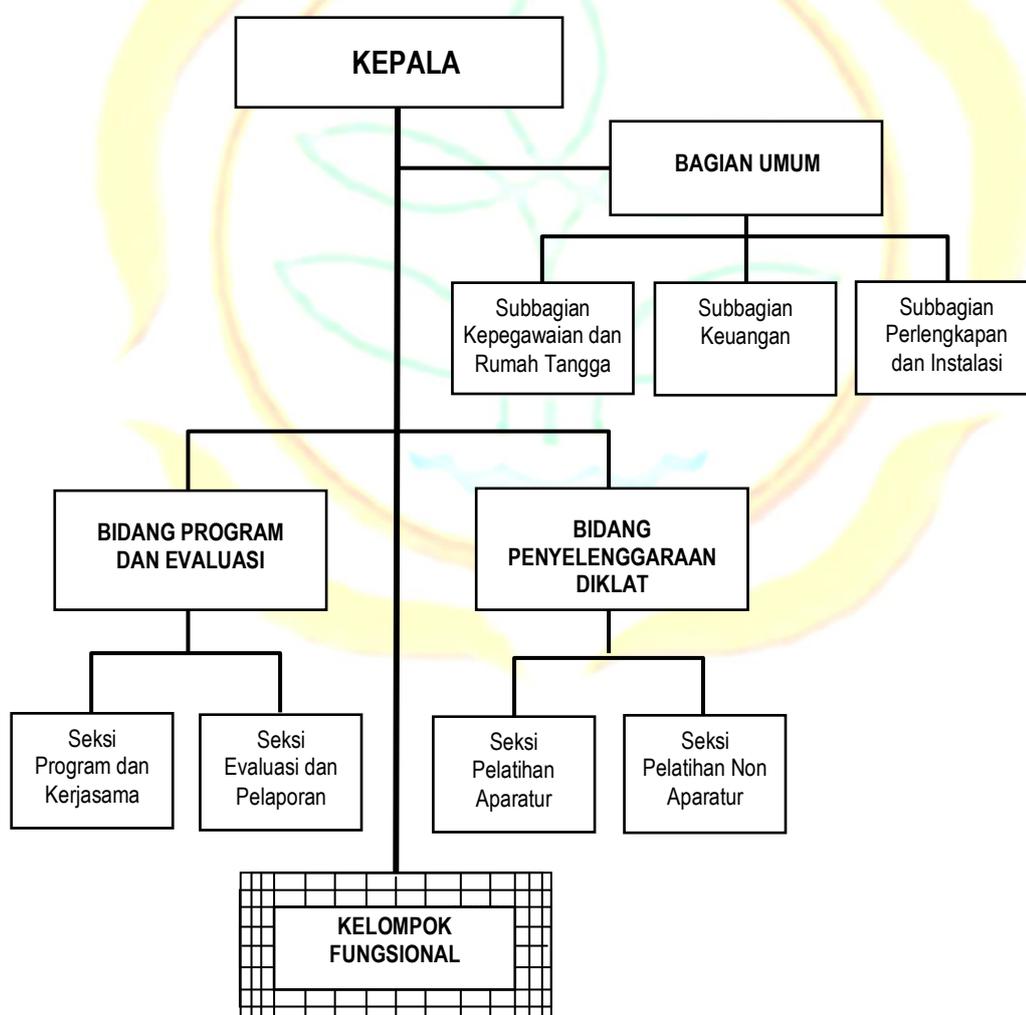
Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala BBPP Lembang. Jumlah pejabat fungsional tersebut ditentukan

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Disamping struktur organisasi formal, dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang memiliki dan mengembangkan Inkubator Usaha Tani (IUT), sebagai sarana konsultasi agribisnis dan penyebaran informasi pertanian.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBPP Lembang secara skematis dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPP Lembang

3. Lingkungan Strategis Organisasi

Lingkungan strategis organisasi dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal balai, yang memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap perkembangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Berdasarkan analisis SWOT (*Strenght*, *Weakness*, *Opportunities* dan *Thereats*), lingkungan strategis BBPP Lembang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan BBPP Lembang adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Dasar Hukum Organisasi/Lembaga yang Stabil/Mantap. Status dan eksistensi kelembagaan yang stabil bahkan terus meningkat sejak berdirinya pada tahun 1962 (terus mengalami perluasan tugas dan fungsi, serta peningkatan eselonering lembaga). Eksistensi BBPP Lembang diakui dengan terbitnya 2 (dua) Peraturan Menteri Pertanian, yaitu: (1) Permentan Nomor 101/Permentan/OT.140/10/2013, tanggal 9 Oktober 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPP Lembang; serta (2) Permentan Nomor 81/Permentan/OT.140/6/2014, tanggal 27 Juni 2014, tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV BBPP Lembang.
2. Program diklat yang dikelola terus mengalami perkembangan, dalam arti jenis diklat yang terakreditasi terus meningkat jumlahnya (saat ini terdapat 11 jenis diklat yang telah terakreditasi). Demikian pula dengan ruang lingkup diklat semakin meluas (hortikultura, perkebunan dan tanaman pangan).
3. Kerjasama yang terjalin dengan berbagai pihak pengguna (pemangku kepentingan) terus meningkat, baik dengan pemerintah pusat (instansi di lingkup Kementerian Pertanian

- maupun lintas kementerian), pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
4. Terus berkembang dan meluasnya kegiatan yang dikelola oleh BBPP Lembang (diklat, magang, inkubasi, konsultasi dan lain-lain) dengan jangkauan sasaran yang semakin banyak, luas dan beragam;
 5. Tersedianya jumlah pegawai dalam jumlah yang cukup besar, yaitu 143 orang pegawai atau merupakan urutan kedua terbesar diantara UPT Pelatihan Pertanian setelah Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi-Bogor;
 6. Komposisi tingkat pendidikan para pegawai yang cukup baik, yaitu sebanyak 70% pegawai merupakan lulusan perguruan tinggi (Diploma s/d Pascasarjana S3), diikuti oleh 27% lulusan pendidikan menengah (SLTA dan SLTP) serta hanya 3% pegawai yang merupakan lulusan pendidikan dasar (SD).
 7. Pengalaman kerja para pegawai sebagian besar telah cukup lama, yakni sebanyak 87% memiliki pengalaman kerja antara 6 s/d 34 tahun. Hanya sekitar 13% yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 5 tahun;
 8. Penguasaan teknologi pertanian, teknologi komunikasi dan informasi yang cukup memadai oleh pegawai/lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.
 9. Memiliki pengalaman dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian yang cukup. Semenjak Tahun 1962 eksistensi BBPP Lembang sebagai lembaga penyelenggara pelatihan berbasis pertanian, telah dikenal masyarakat regional propinsi Jawa Barat, maupun dalam skala nasional, sebagai tempat diklat pertanian bagi aparatur maupun bagi non aparatur pertanian, dan sampai saat sekarang telah memiliki pengalaman panjang dalam

menyelenggarakan berbagai jenjang dan jenis diklat pertanian, serta telah melaksanakan diklat luar negeri, berupa melaksanakan kerjasama diklat teknis komoditas hortikultura, tanaman pangan (KRPL) dan lainnya. Pengalaman ini akan semakin meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan pengguna jasa diklat pertanian terhadap BBPP Lembang.

10. Memiliki jejaring kerja dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah dan swasta. Jejaring kerja yang ada meliputi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia, Instansi/Dinas Teknis Pertanian, Eselon I Teknis lingkup pertanian, swasta yang bergerak di sektor pertanian, baik sebagai narasumber/fasilitator, konsultan, lokasi praktek peserta diklat yang bisa dilaksanakan di tempat petani maju. Dan jejaring kerja ini akan semakin melengkapi kekuatan BBPP Lembang dalam mengoptimalkan tugas pelayanan penyelenggaraan pelatihan pertanian.
11. Memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen ISO 9001:2008. Pelayanan penyelenggaraan diklat pertanian yang dikelola dengan penerapan manajemen terstandar terhadap focus sasaran mutu pelayanan, akan mampu menciptakan penyelenggaraan pelatihan pertanian yang efektif dan efisien, olehnya itu dalam penerapannya kesesuaian pelayanan akan menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan diklat, dan standard kepuasan peserta dalam menerima pelayanan selama proses belajar mengajar menjadi focus pelayanan agar pencapaian tujuan diklat tercapai. Pengakuan melalui sertifikasi ISO, dan konsistensi implementasinya diharapkan dapat meningkatkan daya saing kelembagaan BBPP.

12. Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Penumbuhan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S). Beragamnya kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini semakin meningkatkan aksesibilitas terhadap mitra dan jejaring kerja yang secara berkesinambungan berkontribusi turut memperkuat eksistensi kelembagaan dan organisasi BBPP Lembang, baik terhadap instansi pemerintah, swasta maupun perorangan. Bentuk kerjasama yang telah dan akan dilaksanakan adalah kerjasama kelembagaan, pelatihan pertanian, ketenagaan, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang pelatihan. Demikian pula terhadap upaya peningkatan kompetensi petani dan pelaku usaha pertanian di perdesaan melalui Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S), merupakan bentuk pengembangan kelembagaan pelatihan dalam upaya peningkatan kompetensi pelaku usaha/petani yang sulit dilayani oleh BBPP Lembang, karena faktor lokasi dan biaya yang terbatas.
13. Letak Geografis Yang Strategis. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang memiliki lokasi strategis, yang dapat diakses melalui jalan darat, melewati jalan provinsi dan berada di Kabupaten Bandung Barat, kota yang berdekatan dengan ibu Kota Provinsi Jawa Barat, jaraknya kurang lebih 20 KM dari Kota Bandung, dan dari Bandara Internasional Husein Sastranegara dapat ditempuh dengan lama perjalanan sekitar 1 jam.
14. Fasilitas Sarana Prasarana Cukup Memadai. Sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian yang telah memiliki cukup pengalaman, BBPP Lembang memiliki fasilitas yang cukup memadai, antara lain : asrama kapasitas 250 orang, (termasuk asrama standard

internasional kapasitas 40 orang), ruang kelas sebanyak 5 unit, Aula/auditorium kapasitas 100-200 orang sebanyak 2 unit, ruang meeting/rapat kapasitas 20-30 orang sebanyak 1 unit, gedung kantor 2 unit, Perpustakaan 1 unit, kelas komputer dengan 30 unit CPU 1 unit, Bengkel kerja dan rekayasa alsintan 1 unit, Laboratorium pengolahan hasil 1 unit, ruang prosesing padi/beras 1 unit, pengolahan limbah pertanian/pembuatan kompos dan reactor gas bio 1 unit, kumbung jamur 1 unit, screen house 2 unit, Sarana ibadah Masjid 1 unit, Koperasi Peawai dengan penyediaan barang keperluan peserta diklat 1 unit, lahan praktek tanaman pangan, Perkebunan, Hortikultura, lapangan olah raga, dan kendaraan operasional Bus roda 6 dan roda 4, dan sementara dibangun tahun 2015 ini adalah Laboratorium Kultur jaringan dan Laboratorium Pengendalian Hama Penyakit Tanaman.

b) Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan BBPP Lembang pada saat ini adalah:

1. Aset lahan yang menjadi lokasi balai belum menjadi milik Kementerian Pertanian, tetapi masih merupakan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian kondisi lahan yang tidak terlalu luas (10 Ha) masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan praktek pelatihan yang berjalan.
2. Kondisi kelayakan beberapa sarana-prasarana (gedung kantor, asrama, kelas, laboratorium, alat dan mesin) belum sepenuhnya memadai, baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas) untuk dapat mengakomodir kebutuhan kegiatan praktek peserta diklat, dalam mendukung optimalnya pelayanan penyelenggaraan pelatihan.

3. Peran dan fungsi Unit Inkubator Usahatani sebagai unit pembelajaran kewirausahaan pertanian belum berfungsi optimal. Keberadaan Unit Inkubator Usahatani, sebagai sub system organisasi dalam menunjang tugas dan peran Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) harus senantiasa didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang mempunyai kapasitas dalam pembinaan para tenant menuju kemandirian usaha, keluar dari lingkup permasalahan usaha masing-masing tenant. Dan untuk berjalan proses pembinaan tersebut unit Inkubator Usaha tani yang ada di Balai hendaknya memiliki kompetensi dan otoritas yang cukup dalam mengembangkan kemampuannya agar dapat menguasai/mendalami semua aspek usaha mulai dari rencana usaha, permodalan, manajemen usaha, sampai persoalan pasar, dan lain-lain kompetensi yang dituntut dalam dunia bisnis murni. Dan untuk lebih mengayakan pengalamannya, Inkubator juga seyogyanya memiliki kegiatan usaha pertanian yang dapat dijadikan media pembelajaran bagi peserta diklat dalam bidang kewirausahaan pertanian.
4. Masih belum meratanya kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya fungsi pelayanan penyelenggaraan diklat/kegiatan yang efektif dan efisien. Kelemahan tersebut dirasakan ketika pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bersamaan/parallel, atau ketika dalam waktu bersamaan pejabat/petugas melaksanakan penugasan lain. Demikian pula terhadap penugasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan kebutuhan kompetensi tertentu, masih dirasakan belum seluruh tenaga kediklatan kompeten melaksanakan tugas tersebut.

5. Masih kurangnya motivasi pengembangan diri pada pegawai. Sistem pembinaan, peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM belum direncanakan secara terstruktur dan komprehensif berdasarkan job description organisasi baik bagi Widyaiswara maupun tenaga pelatihan lainnya. Untuk itu diperlukan penelusuran/kajian yang mendalam secara menyeluruh terhadap tugas dan job description organisasi, sehingga masing-masing dapat memahami kebutuhan standar kompetensi yang harus dicapai.
6. Belum proposionalnya penempatan pegawai berdasarkan beban kerja dan kompetensi masing-masing petugas.
7. Belum jelasnya penjenjangan pelatihan (dasar, menengah dan lanjutan) sesuai Permentan No.49 Tahun 2011 untuk pelatihan teknis maupun kewirausahaan.
8. Belum optimalnya peran dan fungsi P4S dalam pelayanan peningkatan SDM Petani sekitar melalui penyelenggaraan permagangan/pelatihan, sebagai lembaga mandiri yang dapat melayani kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petani di wilayah kerjanya.
9. Jenis pelatihan belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan program Kabupaten/Kota.
10. Belum adanya regulasi terhadap pengelolaan biaya/anggaran kerjasama sebagai dasar pengenaan tarif kerjasama baik pelatihan maupun kegiatan pemanfaatan fasilitas pelatihan sehingga menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan peluang kerjasama pelatihan dan permagangan, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta.
11. Kurangnya promosi dan sosialisasi peran BBPP Lembang sebagai tempat/lembaga pelatihan pertanian.

12. Pembiayaan APBN/DIPA belum sepenuhnya mengakoodir pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi balai serta terbatasnya pembiayaan belanja mengikat (rutin) dalam menangani kegiatan pemeliharaan dan operasional sehari-hari perkantoran.

c) Peluang (*Opportunity*)

1. Banyaknya SDM pertanian yang memerlukan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi, profesi dan karir.
2. Besarnya kebutuhan terhadap SDM pertanian yang tersertifikasi.
3. Meningkatnya peran pelatihan dalam transfer inovasi teknologi berbasis IPTEK, antara lain dalam meningkatkan kapasitas produksi, kualitas dan ragam produk sesuai kebutuhan pasar, meningkatkan nilai tambah, dan menurunkan biaya produksi.
4. Besarnya kebutuhan peningkatan kompetensi pelaku utama pembangunan pertanian dalam mengembangkan usahatani.
5. Adanya peluang penumbuhan dan pengembangan lembaga pelatihan pertanian swadaya.
6. Program Pembangunan Pertanian (2015–2019) membutuhkan ketersediaan dan kesiapan SDM pertanian yang kompeten dan berdaya saing sehingga pelatihan pertanian sangat diperlukan untuk mendukung kesiapan SDM pertanian. Demikian pula dengan kebijakan bantuan program alat dan mesin pertanian pada tahun 2015, melalui refocusing dan upaya khusus peningkatan produksi PAJALE, akan diperlukan pelatihan yang berhubungan dengan penanganan alat dan mesin pertanian agar alat dan mesin

- pertanian tersebut dapat bermanfaat dalam menunjang peningkatan produksi dan produktivitas.
7. Kemajuan IPTEK global. Pengembangan inovasi dalam pertanian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas dan ragam produk sesuai kebutuhan pasar serta meningkatkan nilai tambah, menurunkan biaya produksi dan menerapkan tata kelola usaha pertanian yang baik untuk mewujudkan kemandirian pertanian.
 8. Terbukanya pasar melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan menjadi sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Kesatuan pasar dan basis produksi yang tercipta akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Apabila barang, jasa dan SDM Indonesia mampu bersaing dengan negara lain, maka pangsa pasar barang, jasa serta tenaga kerja Indonesia secara makro akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah kawasan tersebut.
 9. Ketersediaan Lahan pertanian produktif. Masih tersedia lahan produktif yang belum dimanfaatkan untuk pertanian. Potensi lahan produktif untuk pengembangan pertanian cukup luas (30 juta Ha). Apabila lahan tersebut dapat dimanfaatkan optimal, maka jaminan peningkatan produksi sektor pertanian akan meningkat, demikian pula terhadap keberlangsungan pembangunan pertanian itu sendiri, untuk itu diperlukan kesiapan SDM yang kompeten dalam pengelolaannya.

10. Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah masih memungkinkan terbukanya ruang yang dapat dikerjakan, hubungannya dengan potensi masing-masing daerah memiliki program pembangunan termasuk didalamnya program pembangunan pertanian yang membutuhkan kesiapan SDM nya baik aparatur maupun non aparatur pertanian, pendekatan dukungan program daerah melalui pendekatan diklat berbasis program dan wilayah bagi kabupaten/kota akan mempercepat sinergi program pusat dan daerah.

d) Tantangan/Ancaman (Threats)

1. Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan pertanian oleh seluruh pemangku kepentingan.
2. Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan lintas sektor dan dunia usaha/industri.
3. Tumbuh dan berkembangnya lembaga pelatihan pertanian sejenis.
4. Keterkaitan(linkage) antara pendidikan-pelatihan–penyuluhan.
5. Perkembangan IPTEK yang cukup pesat jika tidak diimbangi dengan kualitas SDM Pertanian yang tinggi, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam mengambil manfaat dari kemajuan teknologi tersebut.
6. Dampak perubahan iklim global. Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi dunia pertanian karena berdampak serius terhadap lingkungan, produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Disamping itu petani masih sangat minim memahami proses adaptasi (penyesuaian) terhadap perubahan iklim yang berdampak sistematis bagi hasil pertanian. Kurangnya informasi utuh tentang perubahan iklim dapat menghambat optimalisasi hasil produk pertanian

dalam skala makro. Sehingga, petani kita masih sering mengalami risiko gagal panen akibat kekeringan, banjir dan ledakan hama. Dampak Perubahan iklim terhadap lingkungan, menjadi ancaman serius bagi dunia pertanian dan ketahanan pangan nasional.

7. Pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN menuntut SDM yang kompeten profesional dan berdayasaing sesuai dengan bidang keahlian.
8. Belum seluruh eselon I teknis lingkup Pertanian memanfaatkan keberadaan BBPP. Koordinasi dan sosialisasi kepada eselon satu teknis lingkup kementerian pertanian, tentang peran dan tugas BBPP dalam tugas-tugas penyiapan dan pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat pertanian, mempunyai nilai strategis dalam mensinkronkan dan implementasi program dilapangan. Pada tataran implementasi program dilapangan akan dapat terbangun sinergitas dalam mengoptimalkan sumberdaya yang ada, sehingga tujuan program akan dapat dicapai secara optimal pula. Demikian juga bahwa eselon satu teknis lingkup Kementan dapat menjadi narasumber utama terhadap sosialisasi program masing-masing pada penyelenggaraan pelatihan.
9. Kedaulatan pangan melalui kemandirian, ketahanan pangan dan swasembada pertanian. Sebagai negara dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia berlimpah, langkah Indonesia untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan bukanlah tanpa hambatan. Urbanisasi, pengalihan lahan produktif, dan pertumbuhan penduduk membawa dampak terhadap tata kelola bidang pertanian secara keseluruhan. Untuk itu, perlu keseriusan, dedikasi, komitmen dan tanggung jawab semua pihak untuk dapat mewujudkan

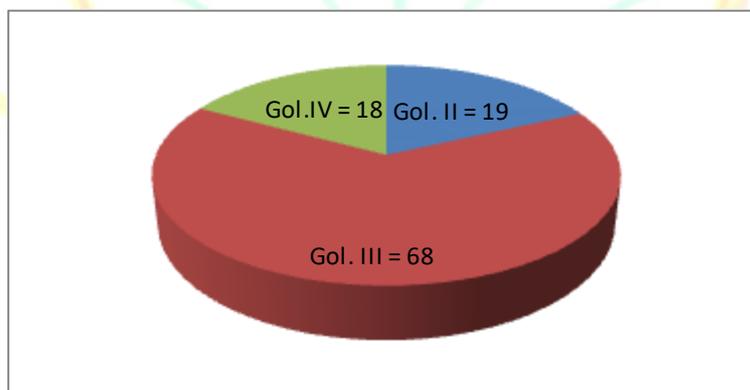
swasembada dan ketahanan pangan nasional, baik untuk saat ini dan bagi generasi penerus. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi serta ketergantungan pada impor pangan menimbulkan ancaman bagi ketahanan pangan Indonesia.

D. Sumber Daya Manusia BBPP Lembang Tahun 2019

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai akhir tahun 2019, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang didukung oleh 105 orang aparat yang terdiri atas 62 orang aparat Laki-laki dan 43 aparat Perempuan ditambah dengan 37 orang tenaga harian lepas.

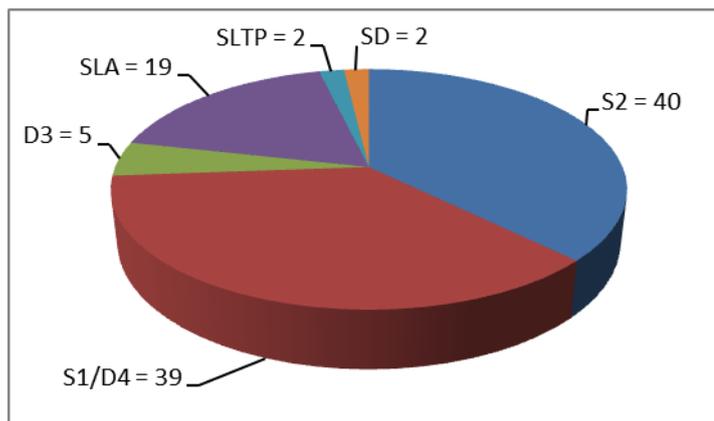
Komposisi pegawai BBPP Lembang tahun 2019 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Golongan, terdiri atas golongan II sebanyak 19 orang; golongan III sebanyak 68 orang; golongan IV sebanyak 18 orang. Komposisi pegawai BBPP Lembang tahun 2019 berdasarkan golongan :



Gambar 2. Komposisi Pegawai BBPP Lembang Berdasarkan Golongan Tahun 2019

- b. Pendidikan, terdiri atas : S2 (magister) sebanyak 40 orang, S1/D4 sebanyak 39 orang, D3 sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 19 orang, SLTP sebanyak 2 orang dan SD sebanyak 2 orang. Komposisi pegawai BBPP Lembang tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan pada gambar 3.



Gambar 3. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Dalam mewujudkan visi dan misi sangat diperlukan adanya sarana prasarana yang memadai yang mengacu pada standar minimal yang diperlukan, sehingga pelaksanaan kegiatan/pelatihan lebih efektif dan efisien serta menyeluruh dengan sistem administrasi yang tertib pada setiap bagian.

Sarana dan prasarana yang dimiliki BBPP Lembang, antara lain:

1. Sarana

Sarana yang dimiliki sampai dengan saat ini, yaitu:

- Gedung Kantor Utama : 450m²
- Ruang Widyaiswara : 150 m²
- Ruang TUK : 1 Unit
- Ruang SPI : 1 unit
- Ruang ISO : 1 unit
- Ruang Server : 5 m²
- Guest House (kapasitas 52 orang) : 4 unit
 - 1. Aster : 1 Unit
 - 2. Mawar : 1 Unit
 - 3. Anggrek : 1 Unit
 - 4. Flamboyan : 1 Unit
- Asrama (kapasitas 169 orang) : 4 unit
 - 1. Azalea : 1 Unit

2. Nusa Indah	:	1 Unit
3. Alamanda	:	1 Unit
4. Anyelir	:	1 Unit
○ Kelas (kapasitas 30 org/kelas)	:	5 unit
○ AULA (kapasitas 200 orang)	:	2 unit
○ Laboratorium Kultur Jaringan	:	1 unit
○ Laboratorium Pengolahan Hasil	:	1 unit
○ Laboratorium Agen Hayati	:	1 Unit
○ Perpustakaan	:	10.000 buku
○ Ruang Makan (kapasitas 200 org)	:	2 unit
○ Ruang Olahraga dan Hiburan	:	1 Unit
○ Rumah Dinas Jabatan	:	28 Unit
○ Screen House	:	8 Unit
○ Lahan Praktek	:	6 Ha
○ Ruang Aklimatisasi	:	120 m ²
○ Unit Usaha Tani Terpadu (Kandang sapi, Biogas, Rmh.Kompos)	:	200 m ²
○ Inkubator Usaha Tani	:	1 unit
○ KRPL	:	1 Unit
○ Rumah Bokashi	:	1 Unit
○ Kandang Ternak	:	3 Unit
○ Gudang Peralatan, Pestisida, Pupuk	:	1 Unit
○ Gudang alsintan	:	1 unit
○ Tempat Ibadah	:	2 Unit
○ Rumah Jaga/Pos	:	2 Unit

2. Prasarana

Prasarana yang dimiliki untuk menunjang dan memperlancar kegiatan operasional administrasi perkantoran serta dalam rangka mewujudkan sistem informasi manajemen BBPP Lembang telah memiliki:

- Peralatan Perkantoran;
- Peralatan Asrama;
- Peralatan Laboratorium Pengolahan dan Laboratorium Kultur Jaringan dan Agen Hayati;
- Peralatan audio visual;
- Peralatan Model rumah Pangan Lestari;
- Peralatan Olahraga;
- Peralatan Hiburan;
- Sistem Informasi Manajemen (SIM):
 - Sistem Laporan Bendahara Instansi (Silabi);
 - Akuntansi Instansi (SAI);
 - Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
 - Sistem Administrasi Keuangan (SAK);
 - Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
 - Sistem Pengendalian (e-evaluation / SIMDAL);
 - Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (PMK No.249).
 - Elektronik Sistem Informasi Pelatihan Pertanian (e-SIPP)
 - Sistem Informasi Kelembagaan Tani (P4S, Ikamaja, LM3)
- Publikasi dan Informasi
 - Jaringan Internet (Website BBPP Lembang);
 - Pengembangan layanan informasi pertanian.

E. Dukungan Anggaran BBPP Lembang Tahun 2019

Untuk mendukung pelaksanaan misi, tugas dan fungsi BBPP Lembang, anggaran awal yang tersedia pada Pagu APBN BBPP Lembang TA.2019 adalah senilai Rp. 24.451342.000,- dengan rincian seperti tabel 1.

Tabel 1.
Anggaran BBPP Lembang Tahun 2019 (Pagu Awal)

No	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Pagu	%
1	Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian	6.866.287.000	28,08
2	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	810.000.000	3,31
3	Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	840.000.000	3,43
4	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan	1.898.800.000	7,77
5	Layanan Internal	3.711.216.000	15,18
6	Layanan Perkantoran	10.325.039.000	42,23
	Total Anggaran	24.451.342.000	100,00

Dari total pagu awal Rp. 24.451.342.000,- diatas, terjadi penambahan anggaran untuk mendukung program pemerintah (APBN) sebesar Rp. 2.587.255.000,- sehingga ditahun 2019, anggaran BBPP Lembang mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 27.038.597.000,- Adanya penambahan anggaran pada DIPA BBPP Lembang menyebabkan adanya perubahan target kinerja BBPP Lembang tahun 2019. Anggaran BBPP Lembang tahun 2019 setelah revisi secara rinci seperti pada tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Anggaran BBPP Lembang Tahun 2019
(Pagu Akhir setelah Revisi)

No	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Pagu	%
1	Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian	8.916.033.000	32,97
2	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	810.000.000	3,00
3	Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	840.000.000	3,11
4	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan	2.219.681.000	8,21
5	Layanan Internal	3.767.996.000	13,93
6	Layanan Perkantoran	10.484.887.000	38,78
	Total Anggaran	27.038.597.000	100,00



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) BBPP Lembang

Rencana strategis BBPP Lembang tahun 2015-2019 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

1. VISI

Visi Badan PPSDMP adalah ***“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”***. Adapun visi Pusat Pelatihan Pertanian adalah ***“Terwujudnya SDM pertanian yang professional, mandiri dan berdayasaing melalui pelatihan dan sertifikasi profesi pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”***. Mengacu kepada visi Badan PPSDMP dan visi Pusat Pelatihan Pertanian, maka BBPP Lembang untuk periode 2015-2019 menetapkan visinya sebagai berikut: ***“Menjadi pusat keunggulan dalam menghasilkan SDM pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing tahun 2019”***

2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang menetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2015-2019. Misi Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang adalah:

1. Meningkatkan mutu program, kerjasama, evaluasi dan pelaporan pelatihan pertanian;
2. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan pertanian;

3. Meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian dan rumahtangga, keuangan, perlengkapan dan instalasi BBPP Lembang;

3. TUJUAN

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi secara terperinci dan lebih jelas yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pencapaian hasil kegiatan. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan BBPP Lembang untuk periode 2015-2019 adalah:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi SDM pertanian.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pelatihan yang profesional dan berkarakter.
3. Pengembangan sistem manajemen penyelenggaraan pelatihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Peningkatan peranserta lembaga dalam penyusunan/ pengembangan SKKNI dan sertifikasi profesi SDM pertanian.
5. Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan dalam / luar negeri.

4. SASARAN

Sasaran merupakan indikator kinerja suatu lembaga dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Lembang pada tahun 2015-2019 memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk menyelenggarakan pelatihan pertanian dalam upaya pengembangan kompetensi aparatur dan non-aparatur pertanian yang dicirikan oleh:
 - i. Terwujudnya BBPP Lembang sebagai kelembagaan pelatihan pertanian yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

- ii. Terwujudnya BBPP Lembang sebagai kelembagaan pelatihan pertanian yang terakreditasi.
 - iii. Terselenggaranya fasilitasi penguatan kelembagaan P4S di wilayah kerja BBPP Lembang.
 - iv. Tersusunnya dokumen kelembagaan BBPP Lembang sebagai kelembagaan pelatihan pertanian yang terakreditasi.
 - v. Terwujudnya inkubator usaha tani (IUT) yang mampu berperan sebagai media praktek pelatihan pertanian dari hulu (pra-produksi) hingga hilir (pemasaran produk).
- 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pelatihan yang profesional, berkarakter dan berdaya saing di BBPP Lembang yang dicirikan dengan:
- a. Meningkatnya kompetensi seluruh Widyaiswara dan tenaga kepelatihan pertanian di lingkungan BBPP Lembang sesuai dengan spesialisasi utamanya.
 - b. Terwujudnya asesor kompetensi dan terpeliharanya sertifikat asesor kompetensi di lingkungan BBPP Lembang.
 - c. Meningkatnya kompetensi tenaga instruktur dan pengelola P4S untuk menjadi wirausahawan yang mampu bersaing di pasar nasional, regional dan internasional melalui penguasaan IPTEK.
 - d. Tersusunnya dokumen pengembangan ketenagaan pelatihan pertanian.
 - e. Meningkatnya jumlah dan kualitas widyaiswara melalui rekrutmen/ penerimaan baru dan alih fungsi tugas sesuai kebutuhan balai.
- 3) Terwujudnya sistem manajemen penyelenggaraan pelatihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dicirikan oleh:

- a. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non-aparatur pertanian melalui pelatihan fungsional, pelatihan manajemen dan kepemimpinan, pelatihan teknis, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendukung program prioritas pembangunan dan pengembangan kawasan pertanian.
 - b. Tersusunnya modul/kurikulum/materi pelatihan yang mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian.
 - c. Berkembangnya sistem pemantauan dan evaluasi serta meningkatnya pengendalian penyelenggaraan pelatihan di BBPP Lembang.
 - d. Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian.
 - e. Berkembangnya model dan teknik pelatihan pertanian sesuai dengan permintaan pasar/stakeholders.
- 4) Meningkatnya peranserta dukungan BBPP Lembang dalam penyusunan/ pengembangan SKKNI dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian yang dicirikan oleh:
- a. Berpartisipasinya ketenagaan pelatihan pertanian BBPP Lembang dalam penyusunan/pengembangan SKKNI sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
 - b. Terselenggaranya sertifikasi profesi bagi aparatur dan non- aparatur pertanian.
 - c. Terfasilitasinya LDP dan TUK di lingkungan BBPP Lembang.
- 5) Berkembangnya jejaring kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri yang dicirikan oleh:
- a. Meningkatnya promosi, publikasi, dan sosialisasi kelembagaan BBPP Lembang melalui berbagai media informasi seperti pameran, profil, media cetak, elektronik, dan display.

- b. Terlaksananya kegiatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama pelatihan dan permagangan pertanian dalam dan luar negeri dengan pihak terkait.
- c. Meningkatnya jejaring kerjasama pelatihan dan/atau permagangan dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaannya.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran Rencana Strategis BBPP Lembang Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3 berikut ini.



Tabel 3.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran Renstra BBPP Lembang
Tahun 2015-2019

Visi dan Misi	Tujuan	IK Tujuan	Sasaran	IK Sasaran Kegiatan
<p>Visi: Menjadi pusat keunggulan dalam menghasilkan SDM pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing tahun 2019”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan mutu program, kerjasama, evaluasi dan pelaporan pelatihan pertanian. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan pertanian. Meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian dan rumah tangga, keuangan, perlengkapan dan instalasi BBPP Lembang. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi SDM pertanian. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pelatihan yang profesional dan berkarakter. Pengembangan sistem manajemen penyelenggaraan pelatihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Peningkatan peranserta lembaga dalam penyusunan/ pengembangan SKKNI dan sertifikasi profesi SDM pertanian. Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan publik BBPP Lembang (Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM). Meningkatnya kualitas pelatihan pertanian (<i>penurunan competency gap index/ CGI</i>). Meningkatnya akuntabilitas kinerja BBPP Lembang. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk menyelenggarakan pelatihan pertanian dalam upaya pengembangan kompetensi aparatur dan non-aparatur pertanian. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pelatihan yang profesional, berkarakter dan berdaya saing di BBPP Lembang. Terwujudnya sistem manajemen penyelenggaraan pelatihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Meningkatnya peranserta dukungan BBPP Lembang dalam penyusunan/ pengembangan SKKNI dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian. Berkembangnya jejaring kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri. 	<ol style="list-style-type: none"> Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM): 2015 = 3,40 2016 = 3,50 2017 = 3,60 2018 = 3,75 2019 = 3,90 Nilai <i>competency gap index/CGI</i> : 2015 = - 2016 = - 2017 = 30 2018 = 22 2019 = 20 Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan yang terjadi berulang: 2015 = - 2016 = - 2017 = 0 2018 = 0 2019 = 0 Jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang: 2015 = - 2016 = - 2017 = 0 2018 = 0 2019 = 0

Keterangan: IK = Indikator Kinerja

5. ARAH KEBIJAKAN

Dalam mendukung arah kebijakan umum kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan arah kebijakan Kementerian Pertanian, maka arah kebijakan Badan PPSDMP meliputi:

- 1) Optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).
- 2) Peningkatan daya saing dan kinerja balai pelatihan pertanian.
- 3) Tranformasi STPP dan SMK-PP UPT menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan).
- 4) Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan arah kebijakan Badan PPSDMP, maka arah kebijakan Pusat Pelatihan Pertanian difokuskan pada peningkatan daya saing SDM dan kinerja UPT pelatihan pertanian, yaitu:

- 1) Peningkatan daya saing lembaga Pelatihan Pertanian melalui: (i) Pengembangan sistem manajemen mutu dan (ii) pengembangan prasarana-sarana UPT Pelatihan;
- 2) Peningkatan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya;
- 3) Pengembangan Pelatihan Berbasis Standar Kompetensi Kerja (SKK/SKKNI);
- 4) Pengembangan model dan pola pelatihan yang berorientasi pasar, dan berbasis kawasan;
- 5) Pengembangan SKKNI dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- 6) Peningkatan peran UPT Pelatihan Pertanian dalam penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (BP3K);
- 7) Fasilitasi P4S sebagai lembaga pelatihan swadaya dalam menyelenggarakan pelatihan/permagangan berbasis IPTEK;

8) Pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan.

Mengacu dan menginduk kepada kebijakan Badan PPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian sebagai organisasi induk dan pembina BBPP Lembang, maka arah kebijakan pelatihan pertanian BBPP Lembang selama periode 2015-2019 difokuskan pada peningkatan daya saing kelembagaan dan peningkatan kinerja, yaitu:

- 1) Peningkatan daya saing lembaga.
- 2) Peningkatan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya.
- 3) Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing.
- 4) Pengembangan model dan teknik pelatihan yang berorientasi pasar, dan berbasis kawasan.
- 5) Peningkatan kontribusi dan peran aktif pada penyusunan/pengembangan SKKNI dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- 6) Peningkatan kontribusi dan peran aktif dalam penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian (BPP).
- 7) Penguatan P4S sebagai lembaga pelatihan swadaya dalam menyelenggarakan pelatihan/permagangan berbasis IPTEK.
- 8) Pengembangan program dan kerjasama pelatihan pertanian.

6. STRATEGI

Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan daya saing dan kinerja BBPP Lembang selama periode 2015-2019 meliputi:

- 1) Standardisasi dan akreditasi lembaga serta mutu layanan pelatihan pertanian dengan:
 - a. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) BBPP Lembang.

- b. Penyiapan, prosesing sertifikasi dan memiliki sertifikat ISO 9001:2015 tentang Sistem Jaminan Mutu.
 - c. Akreditasi lembaga dan jenis pelatihan pertanian yang diampu BBPP Lembang.
- 2) Peningkatan prasarana dan sarana pelatihan pertanian dengan:
- a. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana pelatihan pertanian;
 - b. Pengadaan prasarana dan sarana pelatihan pertanian.
- 3) Peningkatan kegiatan pengembangan profesionalisme tenaga pelatihan pertanian dengan:
- a. Mengikuti pelatihan, magang, seminar dan workshop, studi banding di dalam/luar negeri.
 - b. Pelaksanaan workshop dan seminar di balai dengan mengundang peneliti, dosen, penyuluh pertanian dan praktisi.
 - c. Mengikuti pelatihan khusus pengelolaan penyelenggaraan pelatihan seperti Management of Training (MOT), Training Officer Course (TOC), dan Training of Facilitator (TOF).
 - d. Koordinasi dan konsultasi dalam rangka sertifikasi jabatan Widyaiswara.
- 4) Pengembangan pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan:
- a. Penyelenggaraan pelatihan mendukung peningkatan produksi komoditas strategis antara lain padi, jagung, kedelai, aneka cabe, bawang, sapi serta alat mesin pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
 - b. Pengembangan penyelenggaraan pelatihan berbasis teknologi informasi.
 - c. Sinergitas penyelenggaraan pelatihan dengan UPT Daerah/P4S dan pendayagunaan fasilitator.
 - d. Pelaksanaan MoU lintas sektor dalam penyelenggaraan pelatihan.

- e. Pengembangan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi.
- 5) Pengembangan inovasi pelatihan pertanian dengan:
- a. Penyusunan karya tulis ilmiah pejabat fungsional tentang inovasi pelatihan pertanian.
 - b. Monitoring, evaluasi dan pengkajian tentang model dan teknik pelatihan pertanian di BBPP Lembang.
 - c. Peningkatan peranserta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik.
- 6) Peningkatan jumlah SKKNI bidang pertanian dan sertifikasi profesi SDM pertanian dengan:
- a. Koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder dalam penyusunan SKKNI bidang pertanian.
 - b. Penyusunan SKKNI bidang pertanian bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Kementerian Ketenagakerjaan.
 - c. Mengidentifikasi kebutuhan sertifikasi SDM pertanian.
 - d. Melibatkan lembaga pendidikan pertanian dalam pelaksanaan Sertifikasi kompetensi.
 - e. Penguatan kapasitas kelembagaan (LDP, LSP, TUK)
 - f. Peningkatan kapasitas ketenagaan (asesor, Pengelola TUK)
 - g. Penyusunan perangkat lunak sertifikasi (skema sertifikasi, pedoman, petunjuk pelaksanaan, serta materi uji kompetensi)
 - h. Penjaminan mutu sertifikasi profesi pertanian
- 7) Peningkatan pembinaan dan kerjasama dengan balai penyuluhan pertanian di wilayah kerja dengan:
- a. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan penyuluhan di BPP dengan program/kegiatan pelatihan pertanian yang diselenggarakan BBPP Lembang.
 - b. Peningkatan kerjasama program/kegiatan pelatihan pertanian dengan BPP di wilayah kerja BBPP Lembang.

- 8) Fasilitasi dan kerjasama penguatan P4S sebagai penyelenggara pelatihan permagangan non-aparatur dengan:
 - a. Klasifikasi dan Reklasifikasi P4S;
 - b. Fasilitasi penguatan kelembagaan P4S;
 - c. Kerjasama pelatihan/magang bagi pengelola P4S;
 - d. Pendayagunaan pengelola P4S menjadi Penyuluh Swadaya;
 - e. Jejaring bisnis/temu usaha;
 - f. Fasilitasi kerjasama P4S dengan lintas Eselon I Kementerian Pertanian, lintas kementerian, dan swasta.
- 9) Pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan dengan:
 - a. Pembinaan dan koordinasi program pemantapan sistem pelatihan pertanian.
 - b. Kerjasama pelayanan publik BBPP Lembang dengan stakeholder (kerjasama penyelenggaraan pelatihan, magang/praktek kerja lapang, studi banding, kunjungan, pendayagunaan tenaga pelatihan, pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan) dalam rangka optimalisasi penggunaan sarana prasarana dan ketenagaan BBPP Lembang.
 - c. Pengembangan kerjasama pelatihan meliputi kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Pelatihan dalam negeri antara lain bekerjasama dengan kementerian lain, asosiasi/pengusaha pertanian dan stakeholder, sedangkan kerjasama luar negeri antara lain kerjasama selatan selatan, kerjasama bilateral, regional, multilateral dan kerjasama dengan Organisasi Internasional.

7. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun selain sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan kompetensi SDM pertanian, baik aparatur maupun non-aparatur, juga merupakan instrumen

untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan SDM pertanian tersebut. Dalam konteks pengembangan SDM pertanian, baik aparatur maupun non- aparatur pertanian, maka kerangka regulasi yang terkait dengan kegiatan pelatihan pertanian meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayati Pertanian (RIHP) sebanyak 9 Permentan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian tentang Juklak Pelatihan Teknis Pertanian sebanyak 6 Permentan.
- 3) Peraturan Menteri Pertanian tentang Juklak Penyiapan SDM Pertanian dalam Mendukung Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu.
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Petani melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya.
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Agricultural Training Camp.
- 6) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alat dan Mesin Pertanian.
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian.

- 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Inkubator Agribisnis Pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian.
- 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Pertanian.
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Widyaiswara Pertanian Berprestasi.
- 12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian.
- 13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyiapan Sumber Daya Manusia Pertanian Dalam Rangka Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu.
- 14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89b Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyiapan Sumber Daya Manusia Pertanian Melalui Pelatihan Kepemimpinan Berbasis Revolusi Mental Dalam Reformasi Birokrasi.
- 15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- 16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.
- 17) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Alat dan Mesin Pertanian.
- 18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sektor Pertanian.

- 19) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.
- 20) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Alat dan Mesin Pertanian.
- 21) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelatihan Pertanian.
- 22) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPP Lembang.
- 23) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV BBPP Lembang.
- 24) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560 Tahun 2016 Tentang Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016.

8. KERANGKA KELEMBAGAAN

Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang adalah salah satu UPT pelatihan pertanian lingkup Badan PPSDMP yang dalam operasional sehari-hari dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian. Dasar hukum kelembagaan BBPP Lembang terakhir adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPP Lembang serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV BBPP Lembang. Meskipun organisasi Badan PPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian mengalami perubahan sejak tahun 2015 berdasarkan Permentan Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, namun

perubahan organisasi tersebut sampai saat ini belum diikuti dengan perubahan organisasi di tingkat UPT pelatihan pertanian.

Dalam mendukung tugas fungsinya, BBPP Lembang memiliki 11 jabatan struktural, beberapa kelompok jabatan fungsional tertentu (Widyaiswara, Pranata Komputer, Analisis Kepegawaian, Pustakawan, Arsiparis dan Pranata Humas) dan tenaga pelaksana atau fungsional umum.

Dukungan kerangka kelembagaan BBPP Lembang lainnya meliputi:

- 1) Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.
- 2) Sistem pengawasan yang terdiri dari:
 - a. Satlak Pengendalian Intern (Satlak PI).
 - b. Pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian.
 - c. Pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Sistem akuntabilitas kinerja yang terdiri dari penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) dan Laporan Tahunan (LAPTAH).
- 4) Sistem pelayanan publik yang terdiri dari:
 - a. Standar pelayanan publik dan pelaksanaan pelayanan publik.
 - b. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM).
 - c. Pengukuran indeks penerapan norma budaya kerja (IPNBK).
 - d. Pengelolaan pengaduan masyarakat (DUMAS).
 - e. Pengelolaan unit pengendalian gratifikasi (UPG).
- 5) Norma dan budaya kerja (Mindset dan Culturalset) aparatur BBPP Lembang yang terdiri dari :
 - a. Makna Berkerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin (KKPID).
 - b. Reformasi Birokrasi, yaitu wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
 - c. Revolusi Mental, yaitu integritas, etos kerja dan kerjasama (gotong royong).

9. PROGRAM

Badan PPSDMP tahun 2015 mengemban 1(satu) program, yaitu Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian yang termasuk kedalam Fungsi Ekonomi. Mulai tahun 2016 terjadi perubahan dimana pendidikan memiliki fungsi tersendiri, yaitu fungsi pendidikan. Berdasarkan perubahan tersebut, maka sejak tahun 2016 program yang diemban Badan PPSDMP berubah atau bertambah menjadi 2 program, masing-masing (1) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian; serta (2) Program Pendidikan Pertanian.

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian dan Sekretariat Badan PPSDMP, sedangkan Program Pendidikan Pertanian dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pertanian. Perubahan struktur program, fungsi dan kegiatan yang diemban/dikelola Badan PPSDMP pada periode 2015-2019 disajikan pada tabel 4.

Tabel 4.
Perubahan Struktur Program, Fungsi dan Kegiatan Badan PPSDMP Tahun 2015-2019

Fungsi	Tahun/Program/Kegiatan		
	2015	2016	2017-2019
Ekonomi	Program: Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Kegiatan: 1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 2) Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian 3) Pemantapanan Sistem Pelatihan Pertanian 4) Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya Badan PPSDMP 5) Pendidikan Menengah Pertanian	Program: Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Kegiatan: 1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 2) Revitalisasi Pendidikan Pertanian 3) Pemantapanan Sistem Pelatihan Pertanian 4) Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya Badan PPSDMP	Program: Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian Kegiatan: 1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 2) Pemantapanan Sistem Pelatihan Pertanian 3) Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya Badan PPSDMP
Pendidikan	-	Pendidikan Menengah Pertanian Kegiatan : Pendidikan Menengah Pertanian	Pendidikan Pertanian Kegiatan: Pendidikan Pertanian

Program dan kegiatan yang dikelola oleh BBPP Lembang sebagai salah satu UPT lingkup Badan PPSDMP yang secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian menginduk kepada program dan kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian. Program tersebut adalah Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian dengan kegiatan utama Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian. Selaras dengan kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian, yaitu Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian, selanjutnya BBPP Lembang menjabarkan kegiatan tersebut kedalam 5 (lima) pilar yaitu: (i) penguatan kelembagaan pelatihan pertanian; (ii) peningkatan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian; (iii) peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; (iv) pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi; serta (v) pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian.

10. PROGRAM AKSI

Menginduk kepada program aksi Badan PPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian, yaitu : (1) Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT); dan (2) Regenerasi Petani, maka program aksi yang dieksekusi oleh BBPP Lembang adalah kedua program tersebut di atas.

Dalam mendukung pelaksanaan program aksi GPPT, BBPP Lembang melaksanakan TOT bagi fasilitator pelatihan teknis, pelatihan teknis bagi fasilitator BPP, pelatihan tematik bagi petani di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pelatihan bagi penyuluh pertanian dan pemberdayaan P4S. Kemudian dalam mendukung program aksi Regenerasi Petani, BBPP Lembang menyelenggarakan kegiatan Agri Training Camp (ATC), pelatihan kewirausahaan, permagangan dan inkubasi bagi petani muda.

11. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Puslatan dengan tujuan untuk : (i) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (ii) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (iii) menyusun dokumen penetapan kinerja; (iv) menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan (v) melakukan evaluasi pencapaian kinerja. IKU Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang tahun 2015 – 2019 sebagaimana yang tertuang pada IKU Pusat Pelatihan Pertanian tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya
2. Jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensinya
3. Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM).
4. Nilai competency gap index (CGI).
5. Jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan yang terjadi berulang.
6. Jumlah temuan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang.

12. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Indikator kinerja kegiatan BBPP Lembang pada periode 2015–2019 meliputi :

1. Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat (orang)
2. Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat (orang)
3. Jumlah kelembagaan pelatihan petani (P4S) yang difasilitasi dan dikembangkan (unit)
4. Jumlah kelembagaan pelatihan pertanian yang meningkat kompetensinya (unit)

5. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian (widyaiswara, tenaga tekni kediklatan, instruktur P4S dan pengelola P4S) yang diingkatkan kompetensinya (orang)
6. Jumlah SDM Pertanian yang tersertifikasi (orang)
7. Dukungan pemantapan sistem pelatihan pertanian (dokumen)
8. Nilai indeks kepuasan masyarakat (0 - 100).
9. Nilai competency gap index (CGI).
10. Jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan yang terjadi berulang.
11. Jumlah temuan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang.



13. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja dan kerangka pendanaan kegiatan BBPP Lembang yang akan dicapai selama periode 2015-2019 disajikan pada dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel. 5. Sasaran dan Indikator Kinerja BBPP Lembang Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN					Alokasi Anggaran (000 Rp.)
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya peran, fungsi dan kualitas kelembagaan BBPP Lembang sebagai pusat keunggulan di bidang Hortikultura.	1. Jumlah jenis pelatihan yang terakreditasi	1 pelat.	125.000				
		2. Jumlah unit Agribisnis Usaha Tani yang dikembangkan	10 unit	13 unit	15 unit	15 unit	16 unit	250.000
		3. Jumlah Lembaga pelatihan pertanian yang diakreditasi	1 lembaga	250.000				
2	Menguatnya lembaga diklat profesi (LDP) sebagai tempat uji kompetensi dan sertifikasi profesi bidang pertanian	Jumlah Lembaga Diklat Profesi yang dikuatkan	1 lembaga	500.000				
3	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan diklat pertanian swadaya sebagai lembaga diklat pertanian di perdesaan;	1. Jumlah P4S yang diinventarisasi dan diklasifikasi	5 unit	5 unit	5 unit	8 unit	10 unit	250.000
		2. Jumlah P4S yang direklasifikasi	18 unit	23 unit	32 unit	30 unit	15 unit	500.000
		3. Jumlah P4S yang menyelenggarakan pelatihan pertanian	2 unit	2 unit	3 unit	5 unit	6 unit	450.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN					Alokasi Anggaran (000 Rp.)
			2015	2016	2017	2018	2019	
3	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan diklat pertanian swadaya sebagai lembaga diklat pertanian di perdesaan;	4. Jumlah P4S yang ditingkatkan kapasitasnya	2 unit	2 unit	2 unit	4 unit	4 unit	420.000
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kompetensi ketenagaan pelatihan BBPP Lembang	1. Jumlah fungsional Widyaiswara yang ditingkatkan kompetensinya	30 orang	1.500.000				
		2. Jumlah fungsional tertentu lainnya yang ditingkatkan kompetensinya	4 orang	5 orang	8 orang	10 orang	12 orang	390.000
		3. Jumlah petugas/tenaga kediklatan yang ditingkatkan kompetensinya	115 orang	114 orang	111 orang	109 orang	107 orang	5.560.000
5	Berkembangnya rencana program pelatihan pertanian	1. Jumlah rencana program pelatihan yang tersusun	1 dok.	250.000				
6	Terbina dan meningkatnya kerjasama dan jejaring kerja	1. Jumlah kerjasama pelatihan	22 keg	28 keg	30 keg	35 keg	40 keg	1.500.000
		2. Jumlah kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan	30 keg	40 keg	45 keg	50 keg	55 keg	2.500.000
		3. Jumlah kerjasama tenaga kediklatan	28 keg	30 keg	35 keg	37 keg	40 keg	500.000
7	Mantapnya pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelatihan pertanian;	1. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelatihan pertanian yang tersusun	2 dok.	250.000				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN					Alokasi Anggaran (000 Rp.)
			2015	2016	2017	2018	2019	
8	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pelaksanaan diklat fungsional, profesi, teknis agribisnis dan kewirausahaan	1. Jumlah manajemen pelatihan yang distandarisasi melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	1 dok.	250.000				
		2. Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	1.860 org	2.010 org	2.220 org	2.460 org	2.460 org	
		a. Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis yang mendukung swasembada padi, jagung dan kedelai	1.080 org	1.320 org	1.410 org	1.560 org	1.590 org	31.320.000
		1. Pelatihan TOT Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai	60 orang	30 orang	60 orang	90 orang	90 orang	
		2. Pelatihan teknis agribisnis padi	420 orang	450 orang	510 orang	540 orang	570 orang	
		3. Pelatihan teknis agribisnis kedelai	300 orang	390 orang	390 orang	420 orang	420 orang	
		4. Pelatihan teknis agribisnis jagung	300 orang	450 orang	450 orang	510 orang	510 orang	
		b. Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis bidang hortikultura	390 orang	330 orang	390 orang	480 orang	540 orang	9.585.000
		1. Pelatihan agribisnis hortikultura	60 orang	60 orang	60 orang	90 orang	120 orang	
		2. Pelatihan teknis pengolahan hasil buah dan sayur	60 orang	60 orang	60 orang	90 orang	90 orang	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN					Alokasi Anggaran (Milyar Rp.)
			2015	2016	2017	2018	2019	
8	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pelatihan fungsional, profesi, teknis agribisnis dan kewirausahaan	3. Pelatihan teknis budidaya hortikultura GAP buah	60 orang	30 orang	60 orang	60 orang	90 orang	
		4. Pelatihan teknis budidaya hortikultura gap florikultura	60 orang	30 orang	60 orang	60 orang	60 orang	
		5. Pelatihan teknis budidaya teknologi produksi benih kentang	60 orang					
		6. Pelatihan jaminan mutu berdasarkan HACCP bagi penyuluh pembina kelompok usaha pengolahan hasil	60 orang	60 orang	60 orang	90 orang	90 orang	
		7. Pelatihan teknis agribisnis bawang merah	30 orang					
		c. Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian	120 orang	90 orang	120 orang	60 orang	90 orang	2.160.000
		1. Pelatihan manajemen bagi pimpinan BP3K	120 orang	90 orang	120 orang	60 orang	90 orang	
		d. Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian	270 orang	270 orang	300 orang	360 orang	240 orang	11.520.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN					Alokasi Anggaran (000 Rp.)
			2015	2016	2017	2018	2019	
8	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pelatihan fungsional, profesi, teknis agribisnis dan kewirausahaan	1. Pelat. Dasar POPT Terampil	60 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	
		2. Pelat. Dasar POPT Ahli	60 orang	60 orang	30 orang	30 orang	30 orang	
		3. Pelat. Dasar POPT Alih Kelompok	60 orang	-	30 orang	30 orang	30 orang	
		4. Pelat. Dasar PBT Terampil	-	-	30 orang	30 orang	-	
		5. Pelat. Dasar PBT Ahli	-	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	
		6. Pelat. Dasar Alih Kelompok	-	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	
		7. Pelat. PMHP Terampil	-	-	30 orang	30 orang	-	
		8. Pelat. PMHP Ahli	-	30 orang	-	30 orang	-	
		9. Pelat. PMHP Alih Kelompok	-	-	-	30 orang	-	
		10. Pelat. Dasar PP Terampil	30 orang					
		11. Pelat. Dasar PP Ahli	30 orang					
		12. Pelat. Dasar PP Alih Kelompok	30 orang					
		3. Jumlah non aparatur yang mengikuti pelatihan	1.230 orang	1.440 orang	1.530 orang	1.770 orang	1.890 orang	
		a. Jumlah non aparatur yang mengikuti pelatihan teknis yang mendukung swasembada padi, jagung, dan kedelai	570 orang	840 orang	900 orang	930 orang	930 orang	18.765.000
		1. Pelatihan teknis agribisnis padi	300 orang	450 orang	450 orang	480 orang	480 orang	
		2. Pelatihan teknis agribisnis jagung	150 orang	210 orang	240 orang	240 orang	240 orang	
		3. Pelatihan teknis agribisnis kedelai	120 orang	180 orang	210 orang	210 orang	210 orang	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN					Alokasi Anggaran (000 Rp.)
			2015	2016	2017	2018	2019	
8	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pelatihan fungsional, profesi, teknis agribisnis dan kewirausahaan	b. Jumlah non aparatur yang mengikuti pelatihan teknis bidang hortikultura	270 orang	330 orang	300 orang	360 orang	390 orang	7.425.000
		1. Pelatihan Agribisnis Hortikultura	30 orang	30 orang	30 orang	60 orang	60 orang	
		2. Pelatihan teknis budidaya krisan	30 orang	30 orang	30 orang	60 orang	60 orang	
		3. Pelat. pascapanen & pengolahan hasil buah dan sayur	30 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	
		4. Pelat teknis produksi cabe merah	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	60 orang	
		5. Pelat. teknis horti GAP buah	30 orang					
		6. Pelat. teknis horti GAP florikultura	30 orang					
		7. Pelatihan teknis budidaya teknologi produksi benih kentang	30 orang	60 orang	30 orang	30 orang	30 orang	
		8. Pelat. jaminan mutu HACCP bagi pelaku usaha pengolahan hasil	30 orang					
		9. Pelat. teknis budidaya bawang merah	30 orang					
		c. Jumlah non aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kewirausahaan	30 orang	90 orang	120 orang	180 orang	270 orang	3.105.000
		1. Pelatihan kewirausahaan pemuda tani calon magang jepang	30 orang	30 orang	30 orang	60 orang	90 orang	
		2. Inkubasi petani muda wirausaha	-	30 orang	30 orang	60 orang	90 orang	
		3. Pelatihan Agri Training Camp	-	30 orang	60 orang	60 orang	90 orang	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN					Alokasi Anggaran (000 Rp.)
			2015	2016	2017	2018	2019	
8	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pelatihan fungsional, profesi, teknis agribisnis dan kewirausahaan	d. Jumlah non aparatur yang mengikuti pelatihan kompetensi	360 orang	180 orang	210 orang	300 orang	300 orang	6.075.000
		1. Pelatihan kompetensi budidaya krisan	90 orang	30 orang	30 orang	60 orang	60 orang	
		2. Pelatihan kompetensi budidaya anggrek	60 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	
		3. Pelat. kompetensi fasilitator tan.organic	60 orang	30 orang	30 orang	60 orang	60 orang	
		4. Pelat. kompetensi produksi benih tan.	30 orang					
		5. Pelatihan kompetensi budidaya kedelai	60 orang	30 orang	60 orang	60 orang	60 orang	
		6. Pelat. kompetensi inspektor tan.organic	60 orang	30 orang	30 orang	60 orang	60 orang	
9	Berkembangnya teknik dan metode pelaksanaan diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan, dan hortikultura pertanian	Jumlah pengembangan teknik dan metode pelaksanaan diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan, dan hortikultura pertanian	1 Keg	250.000				
10	Terkawalnya upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedela	Jumlah pengawalan dan supervisi peningkatan produksi padi, jagung dan kedele	4 Kab	3 kab	4 kab	4 kab	4 kab	1.500.000
11	Mengoptimalkannya fungsi Inkubator Usaha Tani sebagai media pembelajaran agribisnis bagi stakeholders	Jumlah unit Inkubator Usaha Tani yang dikembangkan	8 unit	8 unit	9 unit	9 unit	9 unit	250.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN					Alokasi Anggaran (Milyar Rp.)
			2015	2016	2017	2018	2019	
12	Meningkatkannya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi, penatausahaan dan rumah tangga balai sesuai peraturan yang berlaku.	Jumlah Pengelolaan administrasi dan manajemen	12 bulan	5.000.000				
13	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelatihan	1. Jumlah Perawatan Gedung kantor	7 keg	19 keg	14 keg	17 keg	20 keg	
		2. Jumlah Perbaikan peralatan kantor	79 unit	28 unit	11 unit	20 unit	25 keg	
		3. Jumlah Keperluan Perkantoran	3 unit	7 unit	4 unit	4 unit	5 keg	
		4. Jumlah Perawatan kendaraan bermotor	48 unit	24 unit	11 unit	11 unit	11 unit	
		5. Jumlah Pengadaan Kendaraan operasional lapangan	4 unit	1 unit	-	2 unit	2 unit	
		6. Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	5 unit	2 unit	-	2 unit	3 unit	
		7. Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	3 unit	2 unit	3 unit	2 unit	2 unit	
		8. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	179 unit	4 unit	5 unit	7 unit	9 unit	
		9. Jumlah pengadaan Meubelair	1 unit	4 unit	2 unit	3 unit	3 unit	
		10. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana tempat uji kompetensi	3 unit	-	-	-	-	
		11. Jumlah Pembangunan baru	9 unit	3 unit	2 unit	2 unit	1 unit	
		12. Jumlah gedung yang direnovasi	4 unit	2 unit	-	3 unit	4 unit	
14	Memperkuatnya sistem informasi pelatihan pertanian	Jumlah sistem informasi pelatihan pertanian yang dikembangkan	2 paket	2 paket	2 paket	1 paket	1 paket	

B. Perjanjian Kinerja BBPP Lembang Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala Balai BBPP Lembang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja disusun setelah DIPA diterbitkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja dan di review setiap terjadi revisi DIPA. PK BBPP Lembang Tahun Anggaran 2019 revisi terakhir dapat dilihat pada **Tabel 6** dan **Lampiran 3**.

Tabel 6.
Perjanjian Kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2019

Sasaran strategis		Indikator Kinerja Outcome	Target
1		2	3
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPP Lembang	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang	3.85 Skala Likert (1-4)
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan Pertanian	2. Penurunan rata-rata competency-gap index peserta pelatihan pertanian	20 %
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BBPP Lembang	3. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Lembang yang terjadi berulang	0
		4. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)	0

Jumlah Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian : **Rp. 27.038.597.000,-**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019. Sebagai bahan evaluasi kinerja juga dibandingkan dengan kinerja empat tahun sebelumnya serta kinerja yang diharapkan pada rencana strategis yang telah disusun yaitu tahun 2015 -2019.

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja BBPP Lembang dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan diawal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2019 tersebut, maka digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%) dan (4) kurang berhasil (capaian<60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. Lead indicator adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan lag indicator adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator output atau indikator outcome. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II menggunakan jenis

indicator output. Sehingga Perjanjian Kinerja (PK) eselon II menggunakan Lag Indicator .

B. Capaian Kinerja BBPP Lembang Tahun 2019

1. Pengukuran capaian kinerja BBPP Lembang tahun 2019

Pengukuran kinerja kegiatan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Capaian kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang tahun 2019 diuraikan masing-masing tiap sasaran strategis dan indikator kinerja, meliputi : capaian kinerja tahun 2019, perbandingan antara capaian kinerja tahun 2019 dengan tiga tahun sebelumnya (2016, 2017 dan 2018), membandingkan kinerja tahun 2019 dengan target RENSTRA BBPP Lembang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Berikut disampaikan uraian capaian kinerja.

Tabel 7 : Hasil Pengukuran Kinerja BBPP Lembang Tahun 2019 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPP Lembang	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang	3.85 Skala Likert (1-4)	3.85	100.00
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan pertanian	2. Penurunan rata-rata competency-gap index peserta pelatihan pertanian	20%	14,65%	136.52
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BBPP Lembang	3. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Lembang yang terjadi berulang	0	0	100
		4. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)	0	0	100
		Rata rata			109,13%

Jumlah Pagu Anggaran DIPA Tahun 2019 : Rp. 24.451.342.000,-
 Setelah Revisi Jumlah Pagu Anggaran DIPA 2019 : Rp. 27.038.597.000,-
 Jumlah Realisasi DIPA Tahun 2019 : Rp 26.697.630.508,- (98.74%)

Berdasarkan 4 (empat) kegiatan indikator kinerja outcome, maka pencapaian masing-masing kegiatan indikator kinerja outcome tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang = 3.85 (skala likert) dari target 3.85 (target terpenuhi).
- 2) Penurunan rata-rata competency-gap index peserta pelatihan pertanian = 14,65% dari target 20.00% (target terpenuhi).
- 3) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Lembang yang terjadi berulang = 0 temuan dari target 0 (nol) temuan (target terpenuhi).
- 4) Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015) = 0 temuan dari target 0 (nol) temuan (target terpenuhi).

Secara totalitas realisasi fisik rata-rata capaian kinerja sudah tercapai. Hal ini dikarenakan capaian kinerja dihitung berdasarkan rata-rata pencapaian kegiatan. Tabel 6 diatas menunjukkan rata-rata persentase capaian kinerja BBPP Lembang adalah 109,13%, yaitu telah mencapai target **“SANGAT BERHASIL”**. Khususnya pada indikator Penurunan rata-rata competency-gap index peserta pelatihan pertanian dimana persentase capaian targetnya adalah 136,52% dan merupakan Capaian target tertinggi dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Untuk capaian kinerja pada 3 (tiga) indikator lainnya, masuk dalam kategori “Berhasil” dengan capaian masing-masing indikator sebesar 100%, yaitu terdapat pada indikator (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang, (2) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Lembang yang terjadi berulang, (3) Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang.

Hasil pengukuran kinerja BBPP Lembang tahun 2019 dari target realisasi capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPP Lembang

1) Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang

Salah satu upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui penjangkaran atau pengumpulan data dari masyarakat mengenai persepsi mereka terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh instansi pemerintah selama ini. Instrumen yang digunakan untuk penjangkaran informasi tersebut adalah daftar pertanyaan atau kuesioner yang menyangkut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Data IKM tersebut merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat mutu

pelayanan dan menjadi bahan evaluasi bagi pelayanan yang masih memerlukan perbaikan sekaligus menjadi pendorong setiap unit kerja pelayanan publik dalam meningkatkan mutu pelayanannya.

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yang memberikan pelayanan publik, khususnya di bidang pelatihan pertanian bagi aparatur maupun non-aparatur. BBPP Lembang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non-aparatur pertanian. Jadi sebagai bagian integral dari kelembagaan Kementerian Pertanian, BBPP Lembang bertugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik aparatur dan non-aparatur di bidang pelatihan pertanian, utamanya pelatihan pertanian di bidang hortikultura (sayuran, tanaman hias dan buah-buahan). Atas dasar amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/ OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, maka pada setiap semester BBPP Lembang melakukan kegiatan pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan ke depan.

Tujuan pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah untuk : (a) mengetahui tingkat pencapaian kinerja BBPP Lembang dalam melayani peserta pelatihan; (b) mewujudkan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yang mudah sehingga dapat dilaksanakan secara lebih bermutu, berdayaguna dan berhasil guna; (c) menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan

publik. Kemudian laporan pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengukuran IKM bertujuan menyajikan data dan informasi mengenai hasil yang diperoleh dari pengukuran IKM sebagai gambaran tentang kinerja yang dicapai oleh BBPP Lembang dalam pelaksanaan tugasnya.

Metode pengukuran IKM dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui pengisian instrumen berupa kuesioner terstruktur yang diterbitkan Kementerian Pertanian oleh para pengguna layanan BBPP Lembang (peserta Pelatihan, magang/study banding, praktek kerja lapangan).

Manfaat yang diharapkan dari pengukuran dan penyusunan laporan IKM meliputi: (a) tersedianya informasi tentang kinerja dan kekurangan dari masing-masing unsur penyelenggaraan pelayanan publik; (b) tersedianya informasi sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik; (c) memacu persaingan positif antar unit kerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur yang mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2019 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu :

1. **Persyaratan**, yaitu ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu jenis pelayanan publik yang meliputi persyaratan administrasi dan teknis;

2. **Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi pelayanan publik dan penerima pelayanan publik termasuk pengaduan;
3. **Waktu penyelesaian**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan publik;
4. **Biaya/tarif**, yaitu besaran biaya atau tarif yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan/atau mendapatkan pelayanan dari UKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
6. **Kompetensi pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. **Perilaku pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. **Sarana dan prasarana**, yaitu penunjang utama terselenggaranya pelayanan publik dan alat atau bahan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan publik.

Nilai persepsi kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang diberikan oleh BBPP Lembang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Nilai Persepsi IKM Terhadap Pelayanan BBPP Lembang Tahun 2019

NO. UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,77
U2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,79
U3	Waktu penyelesaian	3,78
U4	Biaya atau tarif	3,84
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan publik	3,88
U6	Kompetensi pelaksana	3,80
U7	Perilaku pelaksana	3,93
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,86
U9	Prasarana dan sarana	3,92
NILAI RATA-RATA TERTIMBANG		3,85

Secara rata-rata kumulatif atau keseluruhan, nilai persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelatihan yang diberikan oleh BBPP Lembang Tahun 2019 mencapai 3,85 atau sebesar 100% dari target 3,85 dengan rentang interval 3,77 sampai dengan 3,93 sehingga masuk kategori “**Berhasil**”.

Secara kumulatif atau keseluruhan, interval IKM terhadap pelayanan pelatihan pertanian oleh BBPP Lembang berkisar antara 3 hingga 4, sehingga Nilai Interval Konversi IKM terhadap pelayanan BBPP Lembang adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Nilai Interval Konversi IKM Terhadap Pelayanan BBPP Lembang Tahun 2019

NO. UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NILAI KONVERSI
U1	Persyaratan	94,25
U2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	94,75
U3	Waktu penyelesaian	94,50
U4	Biaya atau tarif	96,00
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan publik	97,00
U6	Kompetensi pelaksana	95,00
U7	Perilaku pelaksana	98,25
U8	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	96,50
U9	Prasarana dan sarana	98,00
NILAI IKM		96,02

Dari hasil tabulasi tersebut dapat dilihat bahwa dengan nilai IKM **96,02** atau **3,85** disimpulkan bahwa kategorisasi mutu pelayanan "**A**" dan kinerja unit pelayanan adalah "**Sangat Baik**". Jika dilihat dari Nilai Rata Rata (NRR) unsur "Perilaku pelaksana" (98,25) nilai tertinggi, sedangkan unsur dengan nilai terendah adalah unsur "Persyaratan" (94,25). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari perilaku pelaksana, sedangkan persyaratan pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Namun nilai 94,25 masih termasuk kategori pelayanan sangat baik.

Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelatihan Pertanian

2) Indikator : Penurunan rata – rata competency gap index peserta pelatihan pertanian

Competency Gap Index (CGI) adalah kesenjangan kompetensi individu terhadap standar kompetensi yang dipersyaratkan atas jabatan yang dimiliki individu tersebut.

Penilaian CGI dapat menggunakan beberapa alternatif sebagai berikut Assesment center, Wawancara perilaku (berbasis kompetensi), Metode 360 derajat dan metode alternatif lainnya. Hasil penilaian CGI Diperoleh dari selisih standar kompetensi kerja dengan nilai kompetensi individu. Nilai kompetensi individu diperoleh dari hasil pre test, post test, pemahaman materi dan nilai sikap perilaku peserta. Nilai CGI yang diperoleh BBPP Lembang pada pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2019 adalah sebesar 14,65% dari target yang ditetapkan sebesar 20.00%. Artinya semakin kecil kesenjangan kompetensi individu terhadap standar kompetensi yang dipersyaratkan dari target yang ditetapkan, nilai CGI yang diperoleh tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada

indikator Penurunan rata – rata competency gap index peserta pelatihan pertanian adalah sebesar 136,52% sehingga masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”. Nilai CGI diperoleh < 20.00% lebih baik karena kesenjangan kompetensi individu terhadap standar kompetensi yang ditetapkan tidak terlalu besar.

Sasaran Strategis : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BBPP Lembang

3) Indikator : Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Lembang yang terjadi berulang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga Negara yang dikhususkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan memahaminya bersama pihak terkait. LHP ini berfungsi untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan, mencegah gejala korupsi dan sebagai alat bukti yang cukup kuat dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Sampai akhir tahun 2019 BPK belum melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan BBPP Lembang dari APBN Kementerian Pertanian TA. 2019, sehingga belum terdapat temuan BPK pada kategori yang sama di tahun tersebut terkait kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar

Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010)

4) Indikator Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan kinerja
2. Penilaian terhadap pengukuran kinerja
3. Penilaian terhadap pelaporan kinerja
4. Penilaian terhadap evaluasi internal
5. Penilaian terhadap capaian kinerja

Sampai akhir Tahun 2019, belum dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di BBPP Lembang.

2. Perbandingan Kinerja BBPP Lembang tahun 2018 - 2019

Pengukuran Kinerja (PK) BBPP Lembang Tahun 2019 baru dapat dibandingkan dengan pencapaian kinerja satu tahun sebelumnya yaitu Tahun 2018. Hal ini disebabkan format indikator perjanjian kinerja 2019 baru mulai diberlakukan dari tahun 2018. Sedangkan PK tahun sebelumnya format indikatornya berbeda.

Dari perbandingan tersebut rata-rata Capaian tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar 109,13%. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan kinerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

Perbandingan capaian kinerja BBPP Lembang tahun 2018 s.d 2019 secara rinci disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10.
Perbandingan Capaian Kinerja
BBPP Lembang Tahun 2018 – 2019

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
		2018	2018	%	2019	2019	%
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang	3,75	3,75	100,00	3,85	3,85	100,00
2.	Penurunan rata-rata competency-gap index peserta pelatihan pertanian	22,00	18,81	116,96	20,00	14,65	136,52
3.	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Lembang yang terjadi berulang	0	0	100,00	0	0	100,00
4.	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)	0	0	100,00	0	0	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja				104,24			109,13

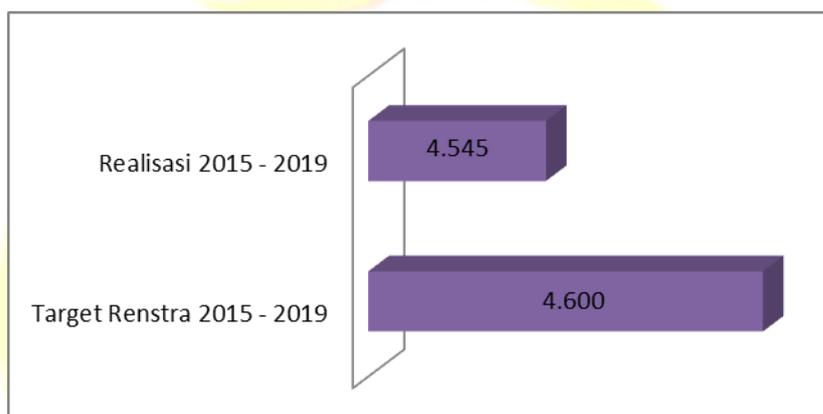
3. Perbandingan capaian kinerja BBPP Lembang pada tahun 2019, dengan target jangka menengah dalam Renstra UPT (2015 sd 2019)

1) Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat

Target menengah dalam Renstra BBPP Lembang (2015-2019) untuk indikator kinerja jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat adalah 4.600 orang

dengan rincian target : tahun 2015 (1.165 orang), 2016 (1.452 orang), 2017 (948 orang), 2018 (928 orang), 2019 (107 orang).

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah aparatur tahun 2015 - 2019 sebesar 4.545 Orang dari target sebesar 4.600 orang (98,80%). Perbandingan realisasi kinerja BBPP Lembang dalam 5 (lima) tahun (2015-2019) dengan target jangka menengah Renstra BBPP Lembang (2015-2019) untuk indikator jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan ditampilkan sebagai berikut :



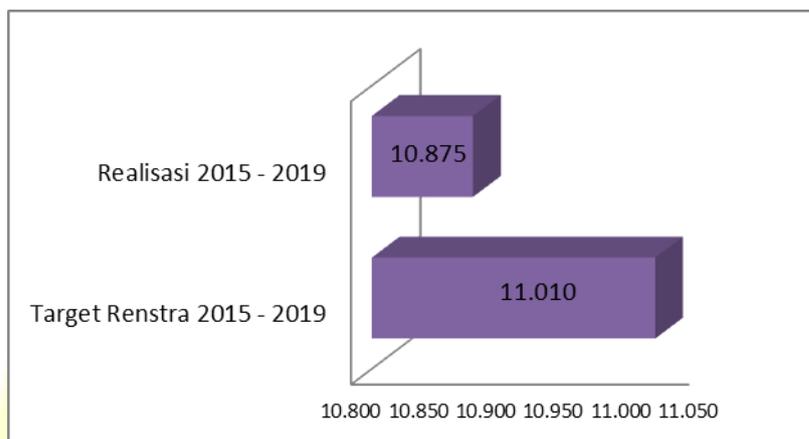
Gambar 4. Capaian indikator jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat

Gambar diatas menunjukkan Realisasi yang telah tercapai dan target pada Renstra BBPP Lembang 2015-2019. Persentase jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat sebesar 98,80% dari target yang telah direncanakan

2) Jumlah Non Aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat

Target menengah dalam Renstra BBPP Binuang (2015-2019) untuk indikator kinerja jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat adalah 7.860 orang dengan rincian target : tahun 2015 (1.230 orang), 2016 (1.440 orang), 2017 (1.530 orang), 2018 (1.770), 2019 (1.890). Realisasi capaian indikator kinerja jumlah non aparatur tahun

2015 – 2019 sebesar 10.875 Orang dari target sebesar 10.010 orang (98,77%). Perbandingan realisasi kinerja BBPP Lembang dalam 5 (lima) tahun (2015-2019) dengan target jangka menengah Renstra BBPP Lembang (2015-2019) untuk indikator jumlah non aparatur yang mengikuti pelatihan :



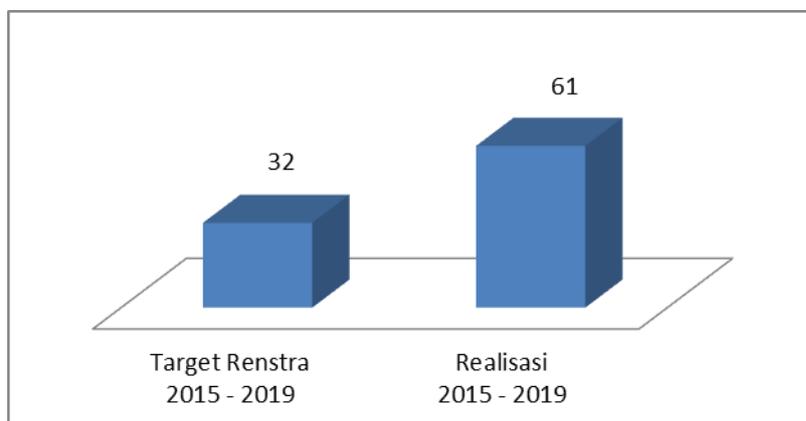
Gambar 5. Capaian Indikator Jumlah Non Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat

Gambar diatas menunjukkan Realisasi yang telah tercapai dan target pada Renstra BBPP Lembang 2015-2019 . Persentase jumlah non aparatur pelatihan yang telah dilatih sebesar 98,77% dari target yang telah direncanakan.

3) Jumlah kelembagaan pelatihan petani (P4S) yang difasilitasi dan dikembangkan

Target menengah dalam Renstra BBPP Lembang (2015-2019) untuk indikator kinerja jumlah pelatihan pertanian yang terfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran adalah 32 unit dengan rincian target : tahun 2015 (4 unit), 2016 (4 Unit), 2017 (5 unit), 2018 (9 unit), 2019 (10 unit). Realisasi capaian indikator kinerja jumlah non aparatur tahun 2015 – 2019 sebesar 61 unit dari target sebesar 32 unit (190,62%). Perbandingan realisasi kinerja BBPP Lembang dalam 5 (lima) tahun (2015-2019) dengan target jangka menengah Renstra BBPP Lembang (2015-

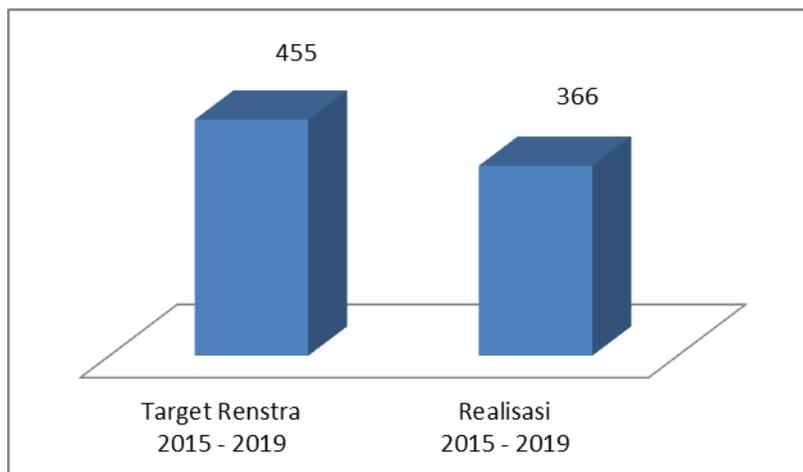
2019) untuk indikator jumlah pelatihan pertanian yang terfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran sebagai berikut :



Gambar 6. Persentase Indikator Jumlah Kelembagaan Pelatihan Petani (P4S) yang difasilitasi dan dikembangkan.

4) Jumlah Aparatur Dan Non Aparatur Pertanian Yang Disertifikasi

Target menengah dalam Renstra BBPP Lembang (2015-2019) untuk indikator kinerja jumlah Aparatur dan non aparatur pertanian yang tersertifikasi adalah 455 orang dengan rincian target : tahun 2015 (0 orang), 2016 (90 orang), 2017 (95 orang), 2018 (0 orang), 2019 (270 orang). Realisasi capaian indikator kinerja jumlah Aparatur dan non aparatur pertanian yang tersertifikasi tahun 2015 – 2019 sebesar 336 Orang dari target sebesar 455 orang (73,85%). Perbandingan realisasi kinerja BBPP Lembang selama tahun 2015 - 2019 dengan target jangka menengah Renstra BBPP Lembang (2015-2019) untuk indikator jumlah Aparatur dan non aparatur pertanian yang tersertifikasi sebagai berikut :



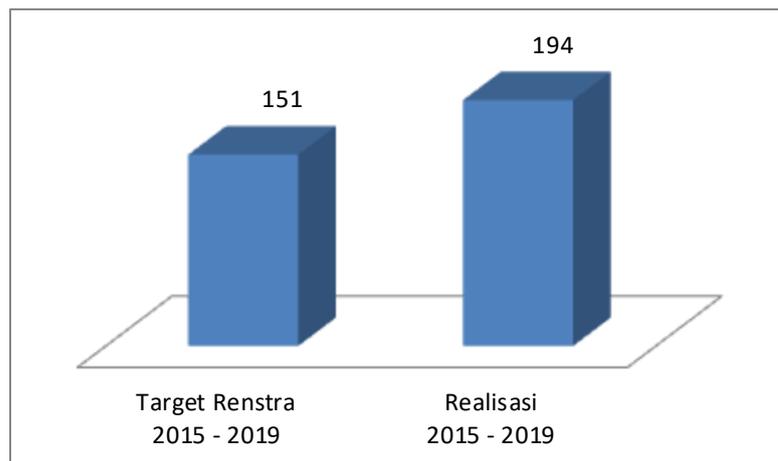
Gambar 7. Persentase Indikator Jumlah Aparatur Dan Non Aparatur Pertanian Yang Disertifikasi

5) Jumlah Layanan Pelatihan

Target menengah dalam Renstra BBPP Lembang (2015-2019) untuk indikator kinerja jumlah Layanan Pelatihan adalah 12 bulan tiap tahun. Realisasi capaian indikator kinerja jumlah layanan pelatihan tahun 2015 – 2019 sebesar 12 bulan setiap tahunnya dapat mencapai target yang ditentukan.

6) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian

Target menengah dalam Renstra BBPP Lembang (2015-2019) untuk indikator kinerja peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian adalah 151 unit dengan rincian target : tahun 2015 (23 unit), 2016 (28 unit), 2017 (37 unit), 2018 (38 unit) dan 2019 (25 unit). Realisasi capaian indikator peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian tahun 2015 – 2019 sebesar 194 unit dari target sebesar 151 unit (128,48%). Perbandingan realisasi kinerja BBPP Lembang selama tahun 2015 - 2019 dengan target jangka menengah Renstra BBPP Lembang (2015-2019) untuk indikator Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian sebagai berikut :



Gambar 8. Perbandingan Indikator Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian

Secara keseluruhan realisasi kinerja BBPP Lembang dibandingkan dengan target RENSTRA tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

Tabel 11. Realisasi Kinerja BBPP Lembang Dibandingkan Dengan Target RENSTRA

Indikator Kinerja	Target RENSTRA	Realisasi	%
	2015 - 2019	2015 - 2019	
Jumlah aparatur pertanian yang terlatih	4.600	4.545	98,80
Jumlah non aparatur pertanian yang terlatih	11.010	10.875	98,77
Jumlah UPT pelatihan pertanian yang terfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran	32 Unit	61 Unit	190,62
Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang disertifikasi	445	336	73,85
Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan	60 bulan	60 bulan	100,00
Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian	151 Unit	194 Unit	128,48

Tahun 2019 Perjanjian Kinerja (PK) sasaran dan indikator kinerja berbeda dengan tahun 2015 – 2017, sehingga perbandingan realisasi kinerja BBPP Lembang jangka menengah dengan target RENSTRA adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Realisasi Kinerja BBPP Lembang Tahun 2019 Dibandingkan Dengan Target RENSTRA

Indikator Kinerja	Target RENSTRA	Realisasi	%
	2019	2019	
Penurunan rata-rata <i>Competency Gap Index</i> (CGI) peserta pelatihan (%)	20	17,18	116,41
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang (Skala Likert)	3.85	3.85	100,00
Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Lembang yang terjadi berulang	0	0	100
Jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015	0	0	100

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

a. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Capaian kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang adalah 3.85 (skala likert) dari target 3.85, persentase 100% (kategori berhasil), hasil analisa penyebab keberhasilan kinerja adalah :
 - Sosialisasi dan imbauan kepada pegawai dan petugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta pelatihan, memberikan pelayanan tanpa memandang tingkatan atau srata, jenis, agama maupun etnis dilakukan terus menerus melalui berbagai media seperti apel pagi, rapat/pertemuan, pembinaan oleh instansi pusat dan lain lain.
 - Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
 - Berprilaku sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan
 - Penanganan pengaduan pengguna pelayanan secara cepat.
- 2) Capaian kinerja untuk penurunan rata – rata competency gap index peserta pelatihan adalah 14,65% dari target 20.00% (kategori sangat berhasil), hasil analisa penyebab keberhasilan kinerja adalah :

- Koordinasi yang baik antara panitia, widyaiswara dan pihak penyelenggara terkait model tes awal dan akhir, metode pembelajaran, penekanan kedisiplinan serta kerjasama antar peserta sehingga terdapat selisih yang tinggi antara tes awal dan akhir, peserta lebih paham dengan materi yang ada sehingga meningkatkan nilai CGI
 - Untuk pelatihan tematik yang dilaksanakan diluar balai panitia yang bertugas telah dibekali pengetahuan/informasi terkait monitoring dan evaluasi khususnya dalam peningkatan nilai CGI, sehingga dapat diperoleh nilai CGI yang maksimal.
- 3) Capaian kinerja jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permentan RB 12 Tahun 2015) untuk indikator kinerja ini belum dilakukan evaluasi terhadap SAKIP, namun unsur – unsur dalam penilaian evaluasi SAKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi internal dan capaian kinerja) telah dipenuhi
- 4) Capaian kinerja Jumlah Temuan BPK atas Temuan Itjen Atas Pengelolaan Keuangan BBPP Lembang adalah 0.00 dari target 0.00, hasil analisa penyebab keberhasilan adalah :
- BPK telah melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali pada tahun berjalan untuk anggaran 2019 dalam pemeriksaan tersebut tidak terdapat temuan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

a. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Pada Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Ruang lingkup manajemen sarana prasarana meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penginventarisasian, pemeliharaan dan penghapusan sarana prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana kantor khususnya penyediaan asset tanah dan bangunan kantor di lingkungan BBPP Lembang menjadi perhatian yang sangat serius, baik penyediaannya maupun efisiensi dalam pemanfaatannya. Untuk melihat efisiensi tingkat efisiensi pemanfaatan gedung kantor beserta fasilitas pendukungnya, dilakukan tinjauan dengan pendekatan sebagai berikut : Sarana BBPP Lembang terdiri dari barang bergerak dan barang tak bergerak. Barang tak bergerak meliputi bangunan kantor, bangunan asrama, guest house, ruangan aula dan kelas, laboratorium, bangunan ruang makan, rumah dinas dan lain-lain. Bangunan asrama terdiri dari empat bangunan, yaitu asrama Azalea, asrama Nusa Indah, asrama Alamanda dan asrama Anyelir yang kesemuanya bisa menampung sebanyak 169 orang. Sedangkan bangunan guest house terdiri dari guest house Aster, guest house Mawar, guest house Anggrek dan guest house Flamboyan. Bangunan asrama dan guest house dimanfaatkan / digunakan jikalau terdapat pelatihan/diklat yang diselenggarakan di BBPP Lembang. Namun khusus untuk guest house Aster dan Flamboyan hanya digunakan untuk tamu. Daftar penggunaan asrama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 13.

Daftar Asrama dan Kapasitas Daya Tampung Tahun 2019

No	Sarana/Fasilitas	Jumlah Kamar (Buah)	Daya Tampung (Org)
1.	Asrama Azalea	19	38
2.	Asrama Nusa Indah	19	57
3.	Asrama Alamanda	15	45
4.	Asrama Anyelir	16	32
5.	Guest House Mawar	5	10
6.	Guest House Anggrek	4	8
7.	Guest House Aster	3	4
8.	Guest House Flamboyan	8	15
	Jumlah	89	209

tugasnya. Perencanaan SDM adalah sebagai proses untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan oleh organisasi dalam waktu dan tempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan.

Penyusunan SDM pada BBPP Lembang dimaksudkan untuk menjamin agar kebutuhan SDM dapat terpenuhi secara konstan, baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk itu perencanaan SDM sudah merupakan bagian integral dari fungsi manajemen SDM bahkan dianggap sangat vital bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian.

Manajemen sumberdaya manusia adalah suatu proses merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan menghasilkan segala bentuk aktivitas kerja untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai. Kaitan antara manajemen sumberdaya manusia dengan peningkatan kinerja sangat berkaitan erat, sehingga menjadi perhatian bagi Kementerian mengembangkan adanya peningkatan sumberdaya manusia sesuai dengan peningkatan kinerja yang dicapainya.

Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia digunakan pendekatan membandingkan output dengan sumberdaya manusia yang digunakan dalam mendukung kinerja. Karena masalah yang dihadapi oleh BBPP Lembang adalah keterbatasan jumlah pegawai yang langsung menangani kediklatan dan kegiatan lainnya, adapun inventarisasi nama jabatan dan jumlah pemangku jabatan BBPP Lembang sebagai berikut :

Tabel 15. Daftar Kebutuhan Pegawai BBPP Lembang

No	Nama Jabatan	Jumlah Pemegang Jabatan (Org)	Kebutuhan (Org)
1	Pejabat Struktural		
	Kepala Balai	1	
	Kepala Bagian Umum	1	
	Kepala Bidang Program dan Evaluasi	1	
	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	1	
	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga	1	
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	
	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Instalasi	1	
	Kepala Seksi Program dan Kerjasama	1	
	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	1	
	Kepala Seksi Pelatihan Aparatur	1	
	Kepala Seksi Pelatihan Non Aparatur	1	
2	Fungsional Tertentu		
	Widyaiswara Ahli Utama	4	
	Widyaiswara Madya	10	
	Widyaiswara Muda	11	
	Widyaiswara Pertama	1	
	Analisis Kepegawaian Muda	1	
	Analisis Kepegawaian Pertama	2	
	Pranata Humas Pertama	1	
	Pranata Humas Terampil	-	1
	Pustakawan Ahli Pertama	1	
	Pustakawan Terampil	-	1
	Pranata Komputer	-	1
	Arsiparis Ahli Pertama	1	
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	
3	Sub Bagian Kepegawaian dan RT		
	Penyiap Bahan Kepegawaian	1	
	Sekretaris Pimpinan	1	
	Pengelola Kerumahtanggaan dan kerjasama	1	
	Pengelola Kehumasan	1	
	Pengelola Ketatausahaan	1	
	Agendaris	1	
	Petugas Pemeliharaan Kendaraan	1	
	Resepsionis	1	
	Teknisi Gudang	1	
	Petugas instalasi air dan listrik	1	
	Pramu kantor	2	
4	Sub Bagian Perlengkapan dan Instalasi		
	Pengemudi	2	1
	Petugas sarana prasarana	1	

No	Nama Jabatan	Jumlah Pemegang Jabatan (Org)	Kebutuhan (Org)
	Petugas SIMAK BMN	2	
	Penatausahaan BMN	2	
	Pramu gudang	2	
	Pramu Asrama	5	
	Pramu Kelas	5	
	Pekarya Kebun	1	
	Pengelola lahan praktek	1	1
	Petugas instalasi kebun/lahan praktek dan screen house	6	
	Pengelola laboratorium	5	
5	Sub Bagian Perlengkapan dan Instalasi		
	Bendahara penerimaan	1	
	Bendahara pengeluaran	1	
	Pengadministrasi keuangan	3	
	Pembuat daftar gaji	1	
	Verifikator	1	
	Petugas SAK	1	
6	Seksi Program dan Kerjasama		
	Penyiap bahan program	1	
	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	1	
	Penyusun bahan kerjasama	1	
	Penyiap bahan kerjasama	1	
7	Seksi Evaluasi dan Pelaporan		
	Penyusun laporan	1	
	Penata bahan evaluasi dan monitoring kegiatan	3	
	Penyiap bahan dan data Binjut dan evaluasi pasca diklat pertanian	1	
8	Seksi Aparatur		
	Petugas materi dan kurikulum	1	
	Pengadministrasi pelatihan	1	
	Pengadministrasi & pengolah data	1	
	Penyiap Bahan Penyelenggaraan Diklat	1	
	Petugas kepesertaan	1	
9	Seksi Non Aparatur		
	Analisis kebijakan pemasaran hasil pertanian	-	1
	Petugas materi dan kurikulum	1	
	Petugas kepesertaan	1	
	Pengadministrasian pelatihan	1	
	Pengadministrasi & Pengolah data	-	1

Dari tabel inventarisasi diatas dapat dilihat bahwa jumlah jabatan yang ada sebanyak 56 (lima puluh enam) jabatan.

Dari Hasil analisis didapatkan bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk mengerjakan jumlah jabatan yang ada yaitu 114 orang. Sementara jumlah pegawai yang ada yaitu sebanyak 103 orang jadi BBPP Lembang masih membutuhkan pegawai sebanyak 11 orang untuk dapat bekerja secara maksimal.

c. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dari total penyerapan anggaran DIPA BBPP Lembang tahun 2019 yaitu Rp. 26.697.630.508,- atau 98,97%, sebesar Rp. 9.398.307.152,- adalah realisasi program dan capaian kinerja terhadap penetapan kinerja tahun 2019. Efisiensi penggunaan anggaran sangat bermanfaat dalam rangka melakukan optimalisasi pencapaian target-target fisik. Adapun penghitungan efisiensi penggunaan anggaran dihitung berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi anggaran.

Tabel 16. Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Target Program Prioritas

No	Program/Kegiatan	Pagu		Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	
1	Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian	8.916.033.000	8.876.997.556	1,00
2	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	810.000.000	787.125.659	1,03
3	Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	840.000.000	839.718.666	1,00
4	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan	2.219.681.000	2.210.669.435	1,00
5	Layanan Internal	3.767.996.000	3.538.141.000	1,06
	Total Anggaran	16.553.710.000	16.252.652.316	1,02

Dari perhitungan dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa :

1. Seluruh 4 (empat) kegiatan tersebut memiliki tingkat efisiensi $E > 1$ yang berarti sangat efisien, dengan rata-rata tingkat efisiensi adalah $E = T : R = 1.02$
2. Dengan tingkat efisiensi sebesar rata-rata 1.02 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keluaran (output) dari kegiatan ini

dapat dilaksanakan dan mencapai target dengan proporsi output lebih besar dari input (anggaran yang digunakan)

3. Dengan masing-masing program/kegiatan prioritas tersebut masih memiliki proporsi presentase anggaran yang tidak terserap disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Pada kegiatan Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian, biaya perjalanan peserta tidak terserap karena calon peserta yang berhalangan hadir sehingga terdapat jumlah anggaran yang telah disiapkan tidak terpakai seluruhnya.
- Pada Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan, realisasi keuangan tidak terserap secara keseluruhan karena penggunaan anggaran digunakan sesuai kebutuhan operasional.
- Pada kegiatan Layanan Internal, penggunaan anggaran pun digunakan sesuai kebutuhan operasional diantaranya pada kegiatan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana penawaran pengadaan barang yang bersifat lelang sehingga didapatkan penawaran yang lebih kecil dari anggaran yang tersedia menyebabkan realisasi keuangan tidak terserap secara keseluruhan.

Jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya anggaran, yang mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tahun 2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 249/2011), capaian kinerja pelaksanaan anggaran BBPP Lembang tahun 2019 pada gambar berikut :



Gambar 9. Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran BBPP Lembang TA 2019 Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 249/2011

Berdasarkan gambar 9, pencapaian nilai kinerja BBPP Lembang pada tahun 2019 termasuk kedalam kategori “**BAIK**”, dengan capaian kinerja anggaran sebesar **85,91**.

Persentase Capaian Kinerja anggaran BBPP Lembang 2019 berdasarkan aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 249/2011 diatas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase pencapaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah **98,71%**
2. Persentase pencapaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Revisi awal adalah **56,71%**
3. Persentase pencapaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Akhir adalah **99,35%**
4. Persentase pencapaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran adalah **99,18%**
5. Persentase pencapaian kinerja dalam hal efisiensi adalah **1,14**

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 249/2011 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus perhitungan sebagaimana berikut :

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Dimana : NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

*Catatan : Rumus Nilai Efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.

Persentase capaian kinerja BBPP Lembang Tahun 2019 dalam hal Efisiensi adalah mencapai 1,14%. Maka penghitungan koefisien Nilai Efisiensinya adalah :

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + (1,14\%/20 \times 50) \\ &= 0,5 + (0,0114 \times 50) \\ &= 0,5 + 0,57 \\ &= 0,107 \text{ atau } 107\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran BBPP Lembang tahun 2019 adalah 107%.

C. Realisasi Anggaran BBPP Lembang Tahun 2019

Tahun 2019 untuk jumlah Pagu Anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang mengalami perubahan disebabkan adanya penyesuaian anggaran dimana Jumlah Pagu Anggaran DIPA sebelum revisi sebesar **Rp. 24.451.342.000,-** dan setelah direvisi menjadi **Rp. 27.038.597.000,-**.

Berdasarkan ringkasan data realisasi anggaran, dapat dilihat secara rinci pada **Tabel 20** sebagai berikut :

Tabel 17
Realisasi Anggaran
Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Pagu		Realisasi	%
		Pagu	Akhir		
1	Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian	6.866.287.000	8.916.033.000	8.876.997.556	99,56
2	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	810.000.000	810.000.000	787.125.659	97,18
3	Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	840.000.000	840.000.000	839.718.666	99,97
4	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan	1.898.800.000	2.219.681.000	2.210.669.435	99,59
5	Layanan Internal	3.711.216.000	3.767.996.000	3.538.141.000	93,90
6	Layanan Perkantoran	10.325.039.000	10.484.887.000	10.219.478.192	97,47
	Total Anggaran	24.451.342.000	27.038.597.000	26.697.630.508	98,74

Untuk Realisasi serapan anggaran BBPP Lembang pada tahun 2019 mencapai Rp. 26.697.630.508,- atau sebesar 98,74%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka secara proporsional angka realisasi serapan anggaran mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2019 BBPP Lembang mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan, yaitu :

a. Kerjasama

Selama tahun 2019 BBPP Lembang telah menerima kegiatan kerjasama dalam bentuk penyelenggaraan, pendayagunaan ketenagaan, pemanfaatan teknologi dan informasi dan pemanfaatan sarana prasarana sebanyak 2.979 orang dari 51 kegiatan, keterangan selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

b. Kegiatan Lainnya

Selain itu ada beberapa kegiatan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang sampai Tahun 2019 yang perlu mendapatkan

apresiasi karena berhasil diselesaikan dengan baik diantaranya Kerjasama dengan Program Taiwan Techniqual Mission (TTM) menyelenggarakan kegiatan diklat sayuran dengan metode On Site Trining terhadap 600 orang petani.





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2019, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang disusun, berdasarkan Permentan 53 tahun 2014. Perjanjian Kinerja (PK) BBPP Lembang dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPP Lembang tahun anggaran 2019 telah ditetapkan dalam surat pengesahan DIPA nomor: SP DIPA-018.10.2.239701/2018 Tanggal 07 Desember 2018 serta terjadinya revisi DIPA sampai nomor: SP DIPA-018-10.2.239701/2019 revisi ke-8 tanggal 26 Desember 2019.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis, sebagian besar pencapaian indikator kinerja masuk dalam kategori “**Berhasil**”, dimana capaian 3 (tiga) indikator sebesar 100%, yaitu terdapat pada indikator (1) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Lembang yang terjadi berulang, (2) Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang; dan indikator (3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang. Sedangkan untuk indikator Penurunan rata-rata competency-gap index peserta pelatihan pertanian masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**” dengan capaian kinerja 116,41%.

Tahun 2019 untuk jumlah Pagu Anggaran BBPP Lembang mengalami perubahan anggaran disebabkan adanya kebijakan dalam mendukung program pemerintah (Kementrian Pertanian) dimana Jumlah Pagu Anggaran DIPA sebelum revisi sebesar **Rp. 24.451.342.000,-** dan setelah direvisi menjadi **Rp. 27.038.597.000,-**. Sedangkan Jumlah realisasi anggaran TA. 2019 sebesar **Rp.**

26.697.630.508,- menyebabkan Persentase realisasi anggaran menjadi sebesar **98,74%**. Penetapan Kinerja (PK) tahun 2019 ditetapkan pada bulan Maret tahun 2019 dan mengalami perubahan sampai pada bulan Desember 2019, sedangkan revisi DIPA terkait perubahan kegiatan dan anggaran APBN-P dikeluarkan pada bulan September tahun 2018. Perubahan kegiatan dan anggaran dilakukan pada beberapa kegiatan termasuk kegiatan pelatihan aparatur dan non aparatur.

Kinerja output rata-rata BBPP Lembang tahun 2019 mencapai **103,97%** dan kinerja keuangan mencapai **98,74%** untuk pagu sehingga rasio output/input mencapai **1,42**. Nilai angka tersebut mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh termasuk kedalam kategori efisien dimana syaratnya efisiensi harus diatas 1.

B. Rencana Tindak Lanjut

Selain itu, beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan BBPP Lembang pada tahun 2019 serta rekomendasi tindak lanjutnya meliputi:

1. Adanya pengurangan anggaran untuk beberapa kegiatan termasuk pelatihan aparatur dan Non aparatur, sehingga dilakukan *rescheduling* kegiatan;
2. Adanya penambahan kegiatan balai yang sebelumnya belum terakomodasi pada DIPA awal sehingga bertambah juga kegiatan balai dan dilakukan revisi kegiatan;
3. Peserta Pelatihan Fungsional yang direncanakan, tidak dapat terpenuhi dikarenakan beberapa calon peserta yang sudah terdaftar tidak sesuai dengan persyaratan, sehingga tidak mencapai target sepenuhnya;
4. Pelaksanaan kegiatan pelatihan yang bersamaan dengan kegiatan lainnya di daerah menyebabkan sebagian peserta tidak dapat menghadiri untuk kegiatan kelembagaan petani;

5. Pelaksanaan pelatihan yang harus dilakukan secara marathon, menyebabkan kekurangan SDM pengelola pelatihan sehingga dilakukan pendayagunaan SDM dari luar penyelenggaraan pelatihan;
6. Adanya pengurangan anggaran untuk beberapa kegiatan termasuk pelatihan aparatur dan Non aparatur sehingga dilakukan *rescheduling* kegiatan;
7. Kurangnya waktu kunjungan Praktek lapang pada kegiatan diklat disebabkan lokasi praktek lapang terlalu jauh, sehingga waktunya habis dalam perjalanan. Untuk itu perbaikan perencanaan kunjungan lapangan perlu dilakukan;
8. Peserta prakerin baik dari Universitas maupun SMK berjumlah cukup banyak terutama pada bulan bulan tertentu, sehingga perlu seleksi yang lebih ketat dalam penerimaan peserta prakerin.

Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan efektifitas koordinasi antara Pusat Pelatihan Pertanian dengan BBPP Lembang sebagai pelaksana kegiatan;
2. segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi;
3. Meyakinkan Pusat Pelatihan Pertanian sebagai pemberi anggaran bahwa pengurangan anggaran dan kegiatan berakibat beberapa kegiatan/target strategis balai yang mendukung program pertanian terkendala bahkan tidak tercapai;
4. Berkoordinasi dengan dinas atau badan asal peserta tentang kepastian kehadiran peserta termasuk kegiatan didaerah untuk mengantisipasi calon peserta agar dapat mengikuti pelatihan sesuai dengan persyaratan pelatihan.

Selain permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan 2019, terdapat permasalahan berdasarkan lingkungan strategis internal BBPP Lembang saat ini yaitu:

1. Kepemilikan lahan yang tidak terlalu luas (10 Ha) masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan praktek diklat yang berjalan;
2. Kondisi sarana-prasarana (gedung kantor, asrama, kelas, laboratorium, alat dan mesin) belum sepenuhnya memadai, baik dalam jumlah/kuantitas maupun dalam kualitas);
3. Dukungan anggaran pemerintah yang tersedia belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan target yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun sehingga proses revisi perlu sering dilakukan untuk penyesuaian kegiatan dan target lembaga.

Sedangkan lingkungan strategis eksternal yang menjadi tantangan bagi BBPP Lembang saat ini dan masa yang akan datang adalah:

1. Persaingan atau kompetisi dalam kompetensi dan kualitas/kredibilitas dengan lembaga-lembaga diklat sejenis, baik sesama lembaga diklat pemerintah, swasta maupun lembaga diklat milik masyarakat;
2. Penguasaan teknologi dan manajemen kelembagaan yang terus berkembang untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan eksistensi, kualitas, dan kredibilitas lembaga serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi diklat;
3. Peningkatan kemampuan dan etos kerja pegawai BBPP Lembang secara berkala dan berkesinambungan dalam upaya terus mempertahankan dan meningkatkan eksistensi lembaga;
4. Peningkatan kemampuan melahirkan inovasi-inovasi baru, utamanya dalam bidang kediklatan dan bisnis pertanian;
5. Peningkatan kompetensi dan kapasitas BBPP Lembang menjadi lembaga diklat internasional, lembaga bisnis dan pencetak wirausahawan pertanian.

Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang terkait dengan lingkungan strategis adalah :

1. Menyusun usulan agar BBPP Lembang dapat memiliki kelas jauh atau lahan praktek diluar balai (outstation) melalui penyediaan lahan tambahan baru atau melalui kerjasama dengan pemda kabupaten/kota;
2. Menyusun prioritas perbaikan atau peningkatan kualitas sarana prasarana balai;
3. Meningkatkan upaya promosi dan kerjasama untuk dapat mengatasi keterbatasan anggaran pelatihan;
4. Mengembangkan kompetensi pegawai secara terus menerus;
5. Meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi pelatihan pertanian.

